

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Januari II Tahun 2021 No. 2

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

Vaksinasi
Momentum Benahi
Penanganan
Pandemi.
Jangan Lalai



Memutus Mata Rantai Bencana

136 Total Bencana
Sepanjang Januari 2021
Menurut Data BNPB
(Image: Peta BNPB)

Sungguh kerusakan yang terjadi hari ini sudah sepantasnya menjadi peringatan, agar perbaikan harus dilakukan, benar-benar diusahakan dan serius kembali ke jalan yang benar. Agar tidak hanya sekedar kalimat perintah tanpa komitmen dan kesungguhan, agar perbaikan bukan hanya sekedar etalase dan formalitas

Bencana terjadi di awal tahun, seakan menjadi pembuka lembaran baru yang pilu dan penuh luka. Saat ini bencana itu macam rupa dan jenisnya; ada alam, non alam dan kesehatan

Banjir yang menerjang sejumlah daerah, tanah longsor dan erupsi gunung. Disisi lain angka covid-19 yang terus merangsek naik dan musibah pesawat jatuh.

Hingga hari ini jumlah

akumulasi korban terus bertambah, sebagian besar bisa dimakamkan namun lainnya hilang belum diketemukan. Sesal dan duka menjadi kata yang mudah ditemukan.

Namun saat hari berganti cara memandang bencana jauh dari apa yang diharapkan. Langkah mitigasi dilakukan hanya sekedar untuk menyempurnakan buku panduan, bukan mencegah kerusakan. Hutan

yang gundul dibiarkan dan terus digunduli. Tanah-tanah rawa dan lembek dicetak jadi beton-beton menjulang, air dikuras hingga dalam dan rumputnya dibiarkan menjadi ilalang.

Siklus ini berlangsung tahunan dan menahun hingga melampaui beberapa generasi. Jangankan mewariskan kebaikan kepada penerus, yang ada justru menumpuk beban hingga ke anak cucu. Berantai mengikat kuat. Benarlah wahyu Allah SWT telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia.

Beragam mengingat dipandang sebagai cara mengergaji kekuasaan, hingga pada akhirnya muncul penindasan dan kesewenang-wenangan. Konflik dan relasi menimbulkan kerenggangan.

Sungguh kerusakan yang terjadi hari ini sudah

sepantasnya menjadi peringatan, agar perbaikan harus dilakukan, benar-benar diusahakan dan serius kembali ke jalan yang benar. Agar tidak hanya sekedar kalimat perintah tanpa komitmen dan kesungguhan, agar perbaikan bukan hanya sekedar etalase dan formalitas. Agar ucapan duka bencana tidak lagi menghiasi kabar pesan harian, berganti dengan dentingan informasi yang penuh kebaikan.

Beragam eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dihentikan, dibatasi dan cara kita memandang sekitar dikembalikan kepada khittah-nya. Pengrusakan bukan dilembagakan, digesakan, dan dimasifkan hingga ke pelosok negeri atas nama investasi. Ada banyak cara dan metode yang ramah lingkungan untuk tetap mendorong investasi, maka dari sanalah harus semua bermula.

Agar niat tak dicoreng oleh rupa dan lampah.

Keseimbangan menjadi kunci dalam memandang bencana, jika ada yang tidak sesuai takaran maka lazimnya dia akan mengambil sisi lain. Hingga akhirnya memunculkan kerusakan.

Sesungguhnya jalan yang kita tempuh bukan cara yang terlampau berbeda dengan generasi sebelumnya, namun bisa jadi perbedaan 'daya rusak' terlihat saat dilakukan bersama-sama dalam sistem yang dibuat sedemikian rupa. Rumitnya sistem itu dibentuk untuk tujuan yang melenceng dari awal : mengabaikan syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada negeri yang besar dan indah ini.

Mari kita cukupkan, sembari masih diberi waktu dan kesempatan

Netty Minta Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Momentum Benahi Penanganan Pandemi, Jangan Lalai

KUTIPAN

Jakarta (14/01) — Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat telah menerima penyuntikan vaksin Sinovac, pada Rabu, (13/01/2021) di Istana Kepresidenan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta pemerintah agar pelaksanaan program vaksinasi ini menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," kata Netty dalam

keterangan medianya, Kamis (14/01).

Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini mengatakan bahwa PKS sudah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah.

"Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, kemampuan dan kualitas vaksin yang digunakan. Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi

perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.

Masukan penting lainnya, kata Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini.

"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dikejutkan dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaannya.

"Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dikejutkan dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif."

Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar mengkonstruksikan standarasi yang sama dalam proses

pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini. Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksioksdprri | @fpksdprri | PKS TV DPR RI

Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Jangan Omdo, Jadikan GeNose dan CePad Alat Pendeteksi Covid-19

KUTIPAN

Jakarta(09/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah bersungguh-sungguh memprioritaskan penggunaan produk inovasi dalam negeri sebagai salah satu alat penanggulangan Covid-19.

Menurut Mulyanto, Pemerintah jangan omdo atau omong doang menjadikan produk inovasi anak bangsa sebagai alat utama penanggulangan Covid-19 tapi harus membuat kebijakan nyata agar produk tersebut benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat.

Sebelumnya diketahui bahwa peneliti Universitas Gajah Mada (UGM) dan peneliti Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil membuat alat pendeteksi Covid-19 dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Produk peneliti UGM diberi nama GeNose sedangkan produk peneliti Unpad diberi nama CePad. Menteri Riset dan

Teknologi Bambang Brodjonegoro dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy berjanji akan menjadikan kedua alat tersebut sebagai alat deteksi Covid-19 resmi.

Untuk itu kedua kementerian tersebut akan membantu menawarkan kepada kementerian lain.

"Saya sangat setuju dan mendukung sekali kalau dua produk inovasi peneliti Indonesia ini ditetapkan menjadi alat deteksi resmi oleh pemerintah," ujar Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menambahkan memang sudah sepatutnya Pemerintah mengapresiasi capaian inovasi teknologi dalam negeri dalam

hal penanggulangan Covid-19. Salah satu caranya dengan membeli produk inovasi tersebut.

"Kalau tidak ada yang beli maka tidak akan diproduksi, kalau sudah demikian maka produk inovasi tersebut tinggal menunggu waktu untuk dimuseumkan, seperti pesawat N-250 si Gatot Kaca," imbuh mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan Pemerintah punya kewajiban untuk mendorong tumbuh-kembangnya riset dan inovasi nasional agar bangsa ini dapat maju dan mandiri, sehingga tidak melulu menggantungkan diri pada ekspor sumber daya alam yang menipis serta ketergantungan pada produk impor.

Salah satu caranya adalah melalui government procurement (pembelian pemerintah). Langkah ini adalah strategi sekaligus insentif di sisi permintaan, agar ada jaminan pasar bagi produk inovasi, sehingga produk tersebut layak diproduksi secara ekonomis.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

Pemerintah jangan omdo atau omong doang menjadikan produk inovasi anak bangsa sebagai alat utama penanggulangan Covid-19 tapi harus membuat kebijakan nyata agar produk tersebut benar-benar dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat.

"Menurut saya ini momen yang tepat untuk mendorong lahirnya inovasi teknologi tepat guna. Di satu sisi masyarakat perlu banyak produk inovasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19, di sisi lain peneliti juga dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam menghasilkan karya-

karya terbaik, serta ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Syukur-syukur dapat menjadi produk ekspor. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dalam memfasilitasi lahirnya inovasi berkualitas yang dibutuhkan masyarakat," tandas Mulyanto.

PSBB Jawa-Bali Diperketat

Anggota FPKS Minta Kemenhub Awasi Prokes di Transportasi Publik

KUTIPAN

Surabaya (07/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan memperketat dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di transportasi publik.

Tak hanya prokes di transportasi publik Jabodetabek, lanjut Sigit, tapi juga juga untuk transportasi publik antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan penyeberangan.

"Kebijakan pengetatan PSBB di Jawa dan Bali harus dibarengi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prokes di transportasi publiknya. Bukan cuma untuk jabodetabek, tapi transportasi publik lain khusus bus AKAP dan angkutan penyeberangan yang menghubungkan Jawa Bali dengan daerah sekitarnya," kata Sigit yang juga Anggota FPKS DPR RI.

Sigit menilai selama ini pelaksanaan prokes di bus AKAP dan angkutan

penyeberangan seperti di pelabuhan Merak-Bakauheni kerap mengabaikan prokes.

Karena itu, Sigit mendesak Kemenhub untuk berkoordinasi dengan para operator bus dan penyeberangan untuk memperketat penerapan prokes untuk menahan laju penyebaran covid 19 melalui transportasi publik.

"Selama ini yang menerapkan prokes secara ketat hanya angkutan udara dan kereta. Moda transportasi lainnya cenderung lebih longgar. Contoh, untuk bus AKAP banyak yang tidak mensyaratkan surat keterangan sehat atau hasil rapid sebagai syarat bisa melakukan perjalanan. Jaga jarak juga tidak ada. Bahkan, didalam bus banyak yang

maskernya dilepas. Begitu juga di angkutan penyeberangan. Meski aturannya sudah ada, tapi minim dalam pelaksanaan. Karena itu kemenhub harus mengawasi implementasi aturan yang dibuatnya sendiri. Awasi pelaksanaannya. Dan operator yang nakl harus diberi teguran," kata Sigit.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat. Hal ini berlaku di daerah Jawa dan Bali.

Pengetatan PSBB ini berdampak pembatasan tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.

"Kegiatan belajar-mengajar secara daring, pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 dan pembatasan kapasitas dan jam moda transportasi", ungkap Sigit mengakhiri.

**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

"Kebijakan pengetatan PSBB di Jawa dan Bali harus dibarengi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prokes di transportasi publiknya. Bukan cuma untuk jabodetabek, tapi transportasi publik lain khusus bus AKAP dan angkutan penyeberangan yang menghubungkan Jawa Bali dengan daerah sekitarnya."

CATATAN FPKS

PROSES/PELAKSANAAN VAKSINASI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Buka data vaksin, verifikasi dan skrining calon penerima,



Siapkan infrastruktur, strategi delivery, dan penyimpanan



SDM terlatih dan perlindungan nakes vaksinator



Tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)



Pengelolaan limbah vaksin



Vaksinasi berkeadilan (wilayah 3T, penduduk di luar 18-59/ tidak memenuhi syarat sinovac)



Toriq Minta TNI, POLRI Dan BIN Optimal Berkolaborasi Untuk Stop Penyelundupan Senjata di Nabire

KUTIPAN

Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan pengendalian senjata api sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 atau Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017.

Tasikmalaya (12/01) — Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menduga Nabire menjadi pintu masuk pengiriman senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dengan ditangkapnya beberapa pelaku yang merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta aparat keamanan semakin memperkuat dugaan tersebut.

Menanggapi dugaan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat minta agar TNI, Polri dan BIN memperkuat kesamaannya dalam rangka menghentikan sindikat pengiriman senjata api dan amunisi untuk KKB di Papua.

“Bais TNI, Baintelkam Polri dan BIN bertanggung jawab

untuk mendeteksi dini potensi pengiriman dan transaksi jual beli senjata api dan amunisi untuk KKB. Saya minta ketiga lembaga tersebut harus terus berkolaborasi secara optimal”, ungkap Toriq.

Ia mengapresiasi kerja aparat yang segera mengungkap sindikatnya, namun sekaligus menyoal karena pengiriman senjata api dan amunisi untuk KKB berulang kali terjadi, dan Nabire menjadi pintu masuk.

“Sebelumnya pada November 2020, Aparat keamanan Papua telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penjualan senjata api ke kelompok bersenjata di Nabire.

Dan yang sangat memprihatinkan tiga tersangkanya adalah oknum aparat”, ungkap Toriq.

Aleg Asal PKS ini meminta agar kasus terbaru pengiriman senjata api dan amunisi untuk KKB diselidiki secara intensif agar dapat terungkap dan menangkap semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat.

“Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan pengendalian senjata api sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 atau Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017”, tegas Toriq.

Menurutnya, dua peraturan itu secara khusus menetapkan mekanisme dan prosedur khusus pelacakan dan penggunaan senjata api di wilayah konflik.

“Satgas gabungan TNI dan Polri yang mengawasi penyimpanan dan penggunaan senjata api dan amunisi juga perlu dibentuk, kemudian di tingkat satuan diletakkan mekanisme pelaporan yang lebih ketat”, Saran Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

“Bais TNI, Baintelkam Polri dan BIN bertanggung jawab untuk mendeteksi dini potensi pengiriman dan transaksi jual beli senjata api dan amunisi untuk KKB. Saya minta ketiga lembaga tersebut harus terus berkolaborasi secara optimal”

Fenomena Kloning Aplikasi Pesan Jadi Sorotan Pembahasan RUU PDP

KUTIPAN

Jakarta (14/01) — Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menyampaikan keluhan masyarakat atas fenomena kloning serta penipuan aplikasi pesan WhatsApp yang marak terjadi.

Dirinya mempertanyakan sejauhmana bentuk mekanisme perlindungan terhadap data pribadi perseorangan yang mampu dijangkau negara melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) nantinya.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Panitia RUU PDP terkait pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panitia RUU PDP Abdul Kharis Almayahri dan dihadiri Anggota Panitia secara fisik maupun virtual.

“Dalam pasal 13 disebutkan pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Nah ini apakah termasuk kasus kloning nomor Whatsapp yang kemudian disalahgunakan oleh penpadat?” tanya Sukamta.

Politisi PKS ini mengatakan masih banyak masyarakat yang secara tidak sengaja atau sadar menyetorkan data pribadinya kepada pihak ketiga.

“Maksud saya, ini kan terkait hak pribadi terhadap data pribadinya. Sementara mayoritas masyarakat awam, dia secara tidak sengaja atau sadar tidak sadar menyetorkan data pribadinya kepada hijackers (pelaku yang berusaha memasuki sistem operasional lain, red). Dimana perlindungan terhadap si pemilik data ini yang bisa kita berikan kepada masyarakat awam pengguna media sosial dan digital,” jelasnya.

Menurut legislator dapi Di Yogyakarta itu, fenomena kloning dan penipuan membuat masyarakat resah dan dirugikan. Ia menyampaikan seringkali ketika korban melaporkan kasus tersebut ke aparat hukum, namun tidak ditindaklanjuti karena nominalnya kecil.

“Tetapi kasus ini banyak sekali, saya dapat data kalau kita nominal itu ternyata ratusan miliar, korbannya banyak sekali. Nah, bagaimana kita memberikan perlindungan melalui PDP ini,” usulnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel A Pangeran mengatakan aplikasi pesan seperti WhatsApp (WA) bisa digunakan diperangkat lain jika pengguna menerima kode One-Time Password (OTP). Biasanya, setelah memasukkan nomor yang akan dijadikan target penyadapan, aplikasi akan meminta kode verifikasi yang akan dikirimkan ke ponsel target untuk bisa login.

Biasanya hijack dilakukan dengan teknik social engineering, bagaimana kita seolah berhadapan dengan aslinya. Sebenarnya orang-



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

“Dalam pasal 13 disebutkan pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini apakah termasuk kasus kloning nomor Whatsapp yang kemudian disalahgunakan oleh penpadat?”

orang membajak WA itu tidak ada, jika subjek atau pemilik data pribadi tidak memberikan kode OTP. Nah, terkadang ini yang kita tidak sadari,” terang Sammy.

Sammy menambahkan, dalam kasus fenomena kloning

pesan WhatsApp, pelaku penipuan dan platform, keduanya bisa dituntut. Namun, akan telusuri pihak yang pertama kali membocorkan data melalui rekam jejak digital.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hindari Ketentuan Privasi Whatsapp

DPR Dorong Pemerintah **Kembangkan Platform Lokal**

KUTIPAN

Jakarta (12/01) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Al muzzammil Yusuf meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong penggunaan platform lokal sebagai sarana komunikasi masyarakat.

Terlebih saat ini masyarakat dibayangi mengenai lemahnya jaminan perlindungan data pribadi di platform media sosial berbagi pesan terutama Whatsapp dan Facebook.

"Saya kira Pemerintah melalui Kemkominfo perlu mendorong lahirnya platform lokal ini. Saya yakin kita tidak kurang pakar teknologi komunikasi," Ucap Muzzammil melalui akun pribadi twitternya, Selasa (12/01/2021).

Muzzammil menyatakan bahwa kebijakan Whatsapp telah banyak mendapatkan protes tidak hanya di dalam negeri, namun juga hampir di seluruh dunia. Situasi ini sepatutnya dijadikan peluang untuk menumbuhkan kreasi

lokal dengan penggunaan platform sosial media dari dalam negeri.

"Saya kira ini peluang. Bukan hanya dengan berpindah ke platform lain produk luar, tapi lebih penting peluang besar untuk memunculkan platform perpesanan kreasi lokal." Sebut Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS tersebut.

Muzzammil yakin dengan kemampuan teknologi komunikasi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri teknologi komunikasi.

Anggota Komisi I itu juga menguatkan pendapatnya

dengan menyebutkan negara lain yang mulai menerapkan peralihan platform ke aplikasi lokal.

"Lihat Pemerintah dan warga Turki yang tengah beralih ke aplikasi lokal buatan mereka, BiP. Kalau di zaman Habibie kita bisa membuat industri pesawat terbang, sekarang kita buktikan bisa bangkit di industri teknologi komunikasi." Ucapnya.

Muzzammil menutup cuitannya dengan menyarankan pemerintah untuk memfasilitasi kerjasama dengan pakar-pakar dari berbagai kampus lokal.

"Pemerintah perlu mendorong lahirnya platform lokal dengan memfasilitasi Kerjasama dengan pakar-pakar dari kampus-kampus, seperti ITB, UI, ITS, dan kampus-kampus se-Indonesia," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Whatsapp telah mengeluarkan kebijakan privasi baru, dimana aplikasi tersebut berbagi data dengan Facebook. Data tersebut adalah data pribadi yang meliputi nomor handphone, informasi perangkat, operator seluler, serta IP Address.



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

"Kebijakan Whatsapp telah banyak mendapatkan protes tidak hanya di dalam negeri, namun juga hampir di seluruh dunia. Situasi ini sepatutnya dijadikan peluang untuk menumbuhkan kreasi lokal dengan penggunaan platform sosial media dari dalam negeri. Saya kira ini peluang. Bukan hanya dengan berpindah ke platform lain produk luar, tapi lebih penting peluang besar untuk memunculkan platform perpesanan kreasi lokal"

Anggota FPKS: Angka Presidential Threshold **Harus Moderat**

KUTIPAN

Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti terkait Presidential Threshold, harus dirumuskan besaran angka yang tidak menghambat anak bangsa untuk menjadi kandidat calon presiden dan menghindari terjadinya perpecahan dimasyarakat.

Jakarta (13/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengingatkan, agar revisi UU Pemilu yang saat ini memasuki tahap harmonisasi di baleg, harus dilakukan secara hati-hati dan bercermin dari kondisi politik pemilu sebelumnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti terkait Presidential Threshold, harus dirumuskan besaran angka yang tidak menghambat anak bangsa untuk menjadi kandidat calon presiden dan menghindari terjadinya perpecahan dimasyarakat.

"Pilpres 2019 menjadi pengalaman pahit demokrasi Indonesia. Bagaimana pilpres menjadi ajang perselisihan, benturan secara fisik, yang masih membekas sampai

sekarang. Saya melihat masih ada sebagian masyarakat yang membawa ingatan pilpres sampai saat ini," ungkapnya.

Oleh karena itu, Surahman menambahkan, besaran angka presidential threshold perlu diturunkan diangka moderat, dimana memungkinkan munculnya 4-5 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Situasi ini akan memungkinkan terjadi putaran kedua karena kemungkinan tidak ada pasangan calon yg memperoleh suara lebih dari 50% dari tersebar merata diberbagai provinsi. Tapi situasi ini lebih baik dibandingkan terjadinya kembali perselisihan politik yang tajam ditengah-tengah masyarakat," papar Surahman.

Anggota Fraksi PKS DPR RI

ini menilai angka 10% suara atau 15% kursi merupakan rumusan angka yang moderat. Besaran angka 10% suara atau 15% kursi, memungkinkan semua partai politik yang ada di parlemen memiliki calon sendiri. Koalisi 2 partai parlemen sudah bisa memenuhi ketentuan 10% suara atau 15% kursi.

"Ditengah pandemi covid 19 yang masih membayangi bangsa Indonesia, partai-partai dituntut lebih memikirkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan politik partainya," pungkas Surahman mengakhiri.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI



Pilpres 2019 menjadi pengalaman pahit demokrasi Indonesia. Bagaimana pilpres menjadi ajang perselisihan, benturan secara fisik, yang masih membekas sampai sekarang. Saya melihat masih ada sebagian masyarakat yang membawa ingatan pilpres sampai saat ini



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Adang Daradjatun: Kapolri Terpilih **Harus** **Lanjutkan** Agenda Reformasi Kepolisian

KUTIPAN

Jakarta (12/01) — Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun berharap Kapolri baru pengganti Jenderal Polisi Idham Aziz dapat melanjutkan agenda reformasi Polri serta sejumlah tantangan yang akan dihadapi Institusi kepolisian di masa depan.

“Siapapun nama yang akhirnya disampaikan Presiden dalam waktu dekat ini merupakan pribadi dengan rekam jejak yang sudah teruji dalam institusi Polri. Hal yang perlu diperhatikan barangkali adalah bagaimana reformasi kepolisian yang tengah berlangsung terus berjalan terlepas dari estafet kepemimpinan di tubuh Polri” ujarnya.

Dalam pengamatan Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun, reformasi kepolisian hendaklah dilihat sebagai agenda yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja dari

korps Bhayangkara.

“Reformasi kepolisian berjalan seiring dengan bergulirnya orde reformasi, (oleh sebab itu) siapapun Kapolri yang terpilih hendaknya melihat agenda ini sebagai proses yang berkelanjutan. Setiap Kapolri harus memiliki strategi yang berorientasi untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat” tutur Wakapolri eriode 2004-2006 itu.

Sebagai salah satu tokoh reformasi di kepolisian, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun melihat Pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan mudah,

diperlukan komitmen, strategi dan soliditas organisasi sehingga sehingga korps bhayangkara sebagai satu kesatuan institusi dapat dibawa menuju arah yang diharapkan sebagaimana amanat reformasi.

Terhadap nama-nama calon kapolri yang beredar, politisi PKS dari Dapil Jakarta ini memilih untuk tidak menjadikannya sebagai sebuah polemik.

“Beberapa waktu yang lalu Kopolnas sudah menyampaikan sejumlah nama kepada Presiden. Nama-nama tersebut merupakan kader terbaik dari yang terbaik di tubuh Polri. Sekarang DPR tinggal menunggu nama yang akan disampaikan presiden untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) melalui Komisi III” ujarnya.

Setelah nama calon Kapolri tersebut diterima dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan nantinya DPR akan memberikan keputusan apakah menyetujui atau tidak calon yang disampaikan Presiden tersebut. Pada prinsipnya DPR



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

“Siapapun nama yang akhirnya disampaikan Presiden dalam waktu dekat ini merupakan pribadi dengan rekam jejak yang sudah teruji dalam institusi Polri. Hal yang perlu diperhatikan barangkali adalah bagaimana reformasi kepolisian yang tengah berlangsung terus berjalan terlepas dari estafet kepemimpinan di tubuh Polri”

akan menilai rekam jejak serta sejauhmana komitmen calon kapolri tersebut dalam mengatasi pelbagai isu yang dihadapi Polri dan tentu saja komitmen penegakan hukum dan pemajuan demokrasi di masyarakat.

“Polri adalah pelindung

dan pengayom bagi seluruh masyarakat. Tentunya kita berharap kebijakan penegakan hukum dan keamanan yang dijalankan Polri non-partisan dan tidak bias kepada segolongan masyarakat.” pungkasnya.

Terkait Investigasi Komnas HAM, **Aleg PKS: Kepolisian dan Kejaksaan segera Lakukan Penegakan Hukum Pro Justitia**

KUTIPAN

Jakarta (09/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aus Hidayat Nur, mengapresiasi konferensi pers Komnas HAM sehubungan hasil investigasi terbunuhnya 6(enam) Laskar FPI dalam insiden jalan tol Cikampek(8/1/2021).

"Laporan hasil investigasi Komnas HAM patut diapresiasi karena telah menjawab keraguan masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus terbunuhnya sejumlah anggota FPI dalam insiden penembakan di tol Cikampek. Saya melihat Komnas HAM telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, cepat dan cermat dengan mengungkap sejumlah fakta-fakta berharga sehubungan dengan pengungkapan kasus terkait" tuturnya.

Dalam pernyataan persnya Komnas HAM menyimpulkan bahwa setidaknya telah terjadi

peristiwa pelanggaran HAM dengan terbunuhnya 4(empat) orang anggota laskar FPI oleh oknum aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya.

Komnas HAM melihat penembakan yang menyebabkan matinya 4(empat) anggota FPI tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk unlawful killing mengingat berdasarkan fakta yang terungkap menunjukkan bahwa sebelum tewas keempat orang korban itu masih hidup dan berada dalam penguasaan petugas resmi negara dalam hal ini aparat kepolisian.

Terhadap hasil investigasi Komnas HAM tersebut Aus Hidayat yang akrab disapa Kang Aus itu melihat pentingnya keterlibatan masyarakat dan civil society untuk mengawal kasus ini.

"Insiden penembakan di jalan tol Cikampek bukanlah peristiwa biasa karena menyangkut dugaan terjadinya ekstrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal demikian tentunya menimbulkan kekhawatiran adanya impunitas dan resistensi penegakan hukum bagi pelaku yang berasal dari institusi kepolisian" ujar legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Sehubungan dengan itu untuk menjawab keraguan dari masyarakat Kang Aus berharap agar Institusi kepolisian Bersama kejaksaan segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan segera melakukan penegakan hukum secara pro justitia terhadap oknum petugas kepolisian tersebut.



KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi III DPR RI

"Insiden penembakan di jalan tol Cikampek bukanlah peristiwa biasa karena menyangkut dugaan terjadinya ekstrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal demikian tentunya menimbulkan kekhawatiran adanya impunitas dan resistensi penegakan hukum bagi pelaku yang berasal dari institusi kepolisian"

"Sejak awal terungkap begitu banyak keganjilan dari pernyataan pers yang disampaikan kepolisian. Sangat mungkin insiden penembakan tersebut bagian dari perintah atasan dari oknum petugas lapangan sehingga untuk bisa mengungkap kasus ini

seterang-terangnya sebaiknya mabes Polri segera menegakkan disiplin organisasi terhadap oknum terkait serta menetapkan tersangka pembunuhan empat orang anggota FPI tersebut", ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Jelang Penunjukan Kapolri Baru, Aleg PKS: Banyak PR menanti!

KUTIPAN

Jakarta (12/01) — Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada awal Februari 2021.

Diskusi dan spekulasi tentang bursa calon Kapolri pun kian riuh dengan berbagai pendapat masyarakat yang concern pada korps Bhayangkara tersebut.

Dilansir dari situs resmi Kompolnas, Mahfud MD selaku ketua sekaligus Menkopolhukam, menyebut setidaknya ada 5 (lima) nama calon Kapolri yang diajukan ke Presiden.

Kelima nama tersebut adalah Wakil Kapolri (Wakapolri) Komjen Gatot Edhy Pramono, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Ariel Sulistyanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimiyati Natakusumah melihat kerluhan

bursa Kapolri itu merupakan sesuatu yang wajar.

Menurut Dimiyati, hal ini dikarenakan posisi Kapolri yang strategis serta rasa cinta masyarakat kepada institusi tersebut sehingga berharap Polri menjadi lebih baik dan humanis.

“Sorotan dan pendapat masyarakat tentang bursa calon Kapolri merupakan sesuatu yang wajar. Selain karena posisi Kapolri yang strategis, saya yakin bahwa hal ini didasari oleh rasa cinta terhadap Polri, sehingga masyarakat ingin agar Polri lebih baik, lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Lebih merangkul.” Jelas legislator asli Banten tersebut.

Lebih jauh, Dimiyati mewanti-wanti bahwa PR Polri sangat banyak terutama sektor pemenuhan dan penghormatan HAM serta perbaikan tubuh internal Polri.

“Kapolri baru akan dihadapkan dengan segudang

PR yang harus diselesaikan dengan baik. Sektor pemenuhan dan penghormatan HAM harus menjadi salah satu prioritas dalam setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan Polri”. Pungkasnya.

“Misalnya, kasus penembakan 6 (enam) laskar FPI harus ditangani dengan adil, transparan dan akuntabel serta harus jadi yang terakhir di Indonesia. Tidak boleh terulang lagi. Kemudian masalah penanganannya massa aksi yang cenderung abuse of power adalah PR lainnya. Polri harus humanis.” Lanjut doktor ilmu hukum jebolan UNPAD ini.

Dari sektor perbaikan internal Polri, lanjutnya, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan narkoba juga harus menjadi perhatian serius Kapolri baru.

“Kami di Komisi III, insyaa Allah akan mengkonfirmasi hal-hal ini pada saat fit and proper test calon Kapolri di DPR nanti,” tutup Dimiyati penuh semangat.



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**
Anggota Komisi III DPR RI

“Sorotan dan pendapat masyarakat tentang bursa calon Kapolri merupakan sesuatu yang wajar. Selain karena posisi Kapolri yang strategis, saya yakin bahwa hal ini didasari oleh rasa cinta terhadap Polri, sehingga masyarakat ingin agar Polri lebih baik, lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Lebih merangkul

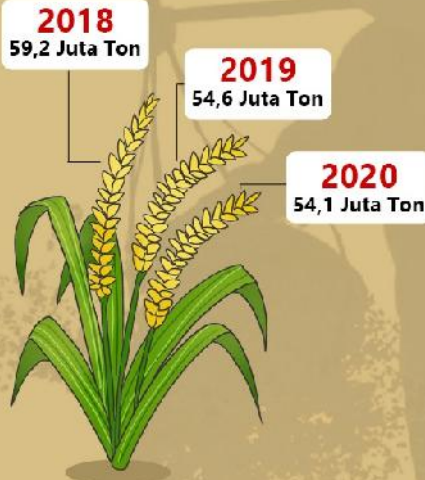


FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PRODUKSI PANGAN NASIONAL TERUS TURUN

**PKS Minta Pemerintah Lindungi Petani Lokal
Menuju Kedaulatan Pangan**

Produksi Padi



Produksi Kedelai



Presiden Pertanyakan Pupuk Subsidi 33 T per Tahun, Aleg PKS: Mestinya Jokowi Bisa Jawab

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mempertanyakan pertanyaan dan argumen orang nomor satu di Indonesia, Bapak Jokowi yang berstatement pupuk subsidi 33T per tahun lalu hasilnya apa.

Pertanyaan presiden ini, kata Akmal, jelas sangat salah karena yang sangat berkompeten menjawabnya adalah dirinya.

Akmal menilai, jelas ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang 10 tahun terakhir mencapai 330T.

"Di beberapa waktu sebagai contoh tahun 2019, terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejala yang besar di tengah masyarakat petani," ungkapnya.

Alasan pemerintah pada saat itu, bahwa penyebab pupuk subsidi langka karena pada tahun 2019 itu kita

mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton. Sedangkan tahun 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton.

"Jangan sampai isu besarnya pupuk subsidi ini karena tidak benarnya dalam manajemen penyaluran dan pelaksanaannya, kemudian dijadikan alasan pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Berkurang 0,9 jt ton saja, petani di berbagai wilayah Indonesia mulai bergejolak. Yang perlu di tertibkan oleh pemerintah adalah, yakni orang-orang sebagai oknum yang selama ini mempermainkan pupuk subsidi dan mengeruk keuntungan secara pribadi", tutur Akmal.

Politisi PKS ini menyebutkan, tidak setiap tahun angka pupuk subsidi flat 33T. Pada 2016, misalnya, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp26,8 triliun. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp31,3 triliun pada 2017, Rp33,6 triliun pada 2018 dan Rp34,30 triliun pada 2019.

"Saya mengingatkan kepada pemerintah, dengan adanya pupuk subsidi saja, para petani kesulitan untuk mencapai BEP dari hasil produksi pertaniannya. Jangan sampai di hilangkannya anggaran pupuk subsidi ini, kemudian di alihkan untuk alokasi impor produk pangan dan pertanian. Untuk itu, evaluasi penyelenggaraan pupuk subsidi ini mesti mendalam dan temukan akar persoalannya. Mestinya ini yang mampu jawab kan presiden. Yang pemerintah siapa ?", tanya Akmal.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jangan sampai isu besarnya pupuk subsidi ini karena tidak benarnya dalam manajemen penyaluran dan pelaksanaannya, kemudian dijadikan alasan pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Berkurang 0,9 jt ton saja, petani di berbagai wilayah Indonesia mulai bergejolak. Yang perlu di tertibkan oleh pemerintah adalah, yakni orang-orang sebagai oknum yang selama ini mempermainkan pupuk subsidi dan mengeruk keuntungan secara pribadi

Tahun 2021, Johan Dorong Kementan Fokus Tingkatkan Produksi Pangan

KUTIPAN

Jakarta (07/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengungkapkan bahwa tantangan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan)

memasuki Tahun 2021 adalah terus berusaha meningkatkan produksi pangan agar mencukupi kebutuhan pangan nasional dan semoga produksi yang cukup tersebut bisa memiliki dampak terhadap pengendalian harga pangan.

Johan mengingatkan pemerintah karena saat ini daya beli masyarakat terus menurun seiring masa pandemi yang terus berkepanjangan dan kondisi ekonomi yang mengalami resesi.

"Maka persoalan pangan harus menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan primer bagi seluruh penduduk Indonesia," ujar Johan.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa adanya gejolak harga kedelai yang tidak terkendali

dan kenaikan HET pupuk bersubsidi yang terjadi pada awal tahun 2021 ini telah berdampak naiknya harga pangan.

"Sehingga pengeluaran rumah tangga terhadap pangan semakin meningkat dan menambah beban rumah tangga petani untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya", urai Johan.

"Pada awal tahun 2021 ini saya tegaskan kepada Kementan agar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan terus menjaga stabilitas harga pangan," tegas Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini memaparkan bahwa produksi pangan, khususnya padi dan kedelai terus mengalami

penurunan sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Johan mencontohkan produksi padi pada tahun 2018 sebesar 59.200.534 ton kemudian mengalami penurunan pada produksi tahun 2019 yakni menjadi 54.604.033 ton dan tahun 2020 kemarin juga sekitar 54,17 juta ton.

"Demikian juga dengan produksi kedelai kita, terus turun drastis sejak 2018 sebesar 0,65 juta ton turun menjadi 0,42 juta ton pada tahun 2019 kemudian turun lagi menjadi 0,32 juta ton pada tahun 2020 lalu, yang dampaknya sekarang kita rasakan harga kedelai meroket tajam karena nilai produksi kita sangat rendah", urai Johan.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTB 1 ini berpandangan agar Kementan banyak melakukan inovasi budidaya tanaman pangan dan terus menerapkan implementasi Pertanian yang maju dengan pemberdayaan petani lokal untuk mendorong peningkatan produktivitas Pertanian khususnya tanaman pangan.

"Saya berharap di tahun 2021, Kementan lebih giat memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani untuk meningkatkan produksi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

Saya berharap di tahun 2021, Kementan lebih giat memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani untuk meningkatkan produksi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani

BERAGAM KEBUTUHAN NAIK DI AWAL TAHUN, BUKTI PEMERINTAH TIDAK MAKSIMAL LAYANI RAKYAT



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PKS MENOLAK KENAIKAN BPJS KELAS III DAN
BEA MATERAI. PERBAIKAN TATA NIAGA PUPUK DAN
KEDELAI MUTLAK DILAKUKAN**



Aleg PKS: Kebijakan Pemerintah yang Masih Tetap Impor Beras Hanya Isapan Jempol

KUTIPAN

“Meskipun Dirut Bulog mengatakan pada tahun 2018 bahwa Indonesia tidak perlu impor beras 2 tahun sampai 2020 karena cadangan beras melebihi batas aman, nyatanya Indonesia masih impor beras pada tahun 2019 sebanyak 444,5 ribu ton dan tahun 2020 sebanyak 261,8 ribu ton

Jakarta (13/01) — Rencana Pemerintah untuk tidak akan impor beras hanya isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dengan impor beras pada tahun 2019 sebanyak 444,5 ribu ton dan pada tahun 2020 sebanyak 261,8 ribu ton

“Meskipun Dirut Bulog mengatakan pada tahun 2018 bahwa Indonesia tidak perlu impor beras 2 tahun sampai 2020 karena cadangan beras melebihi batas aman, nyatanya Indonesia masih impor beras pada tahun 2019 sebanyak 444,5 ribu ton dan tahun 2020 sebanyak 261,8 ribu ton,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet kepada

media.

Maka ujar Slamet, pernyataan Dirut Bulog tidak bisa dipegang. Hanya klaim sepihak dan Tidak sejalan dengan Kemendag yang hobi impor beras.

Menurut Slamet, saat harga kedelai meroket, Presiden Jokowi mengatakan kenapa kita tidak bisa menghentikan impor kedelai seperti kita berhasil tidak impor beras selama 2 tahun (2019-2020). “Itu sebuah pernyataan yang keliru,” tegasnya.

Dimasa Presiden Jokowi, sambung Slamet, terbesar impor beras terjadi di tahun 2018 sebesar 2,25 juta ton. Hal

ini menyebabkan stok CBP Bulog menjadi berlebih.

“Jadi bukan karena produktifitas panen kita yang meningkat signifikan tetapi karena impor yang berlebihan. Jadi wajar Bulog mengatakan tidak perlu impor lagi, tapi kenyataannya dalam kondisi demikian pun pemerintah tetap impor,” jelasnya

Slamet mengatakan, masalah kedaulatan pangan Indonesia masih jauh dari harapan.



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Jadi bukan karena produktifitas panen kita yang meningkat signifikan tetapi karena impor yang berlebihan. Jadi wajar Bulog mengatakan tidak perlu impor lagi, tapi kenyataannya dalam kondisi demikian pun pemerintah tetap impor



Whatsapp Status

Setinggi apapun
aku terbang tidak akan
mencapai surga **bila tidak
sholat lima waktu.**

STATUS TERAKHIR KAPTEN PILOT SRIWIJAYA

Terkait Infrastruktur Daerah, Syahrul Aidi: Kalau Ada yang Tersendat Sampaikan ke Saya

KUTIPAN

Pekanbaru (11/01) — Tahun anggaran 2021 segera berjalan. Saat ini semua ini daerah berupaya menggesa pembangunan wilayahnya dengan memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dari berbagai program

Tak terkecuali seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

Terkait hal itu, Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maaazat meminta kepada kepala daerah untuk berkoordinasi dengannya jika menemui kendala atau ada program pembangunan yang bersumber dari dana pusat yang dapat dia bantu.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi saat diwawancarai usai peresmian dan serah terima program Instalasi Pengolahan Lumpur dan Tinja (IPLT) di Kabupaten Kampar pada Senin (11/1/2021). Hadir saat itu Bupati Kampar beserta jajaran, dan Kepala BPPW Riau beserta jajarannya.

"Tugas saya di Komisi V DPR RI memastikan banyaknya anggaran pusat yang kita bawa ke Riau. Apapun programnya. Nah, saat ini tahun anggaran 2021 segera berjalan, bagi kepala daerah yang menemui kendala atau tersendat, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Karena memang itu tugas saya," kata Syahrul Aidi.

Dia mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama untuk merebut dana pusat. Kalau dulu kepala daerah menemui kendala tidak memiliki jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat, sekarang dia sebut, dia dapat menjadi jembatan komunikasi tersebut.

Sementara itu Kepala

BPPW Riau, Ichwanul Ihsan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepala daerah harus menghitung dengan cermat atas usulan kepada pemerintah pusat. Jangan sampai usulan tersebut di luar kelaziman.

Seperti saat Pemkab Kampar mengusulkan delineasi ulang wilayah kumuh (untuk Program Kotaku) yang awalnya hanya 50 hektar pada tahun 2017 menjadi 200 hektar pada tahun 2020. Dia meminta agar hal seperti ini didiskusikan sebelumnya.

Bupati Kampar dalam sambutannya menyampaikan bahwa dia akan makin semangat dan menyampaikan bahwa Kampar sangat membutuhkan sentuhan pembangunan yang bersumber dari dana APBN.

Syahrul menyinggung pengadaan instalasi air minum di kecamatan Tapung Hulu yaitu di Desa Sukaramai semoga dapat dikerjakan tahun 2021.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Tugas saya di Komisi V DPR RI memastikan banyaknya anggaran pusat yang kita bawa ke Riau. Apapun programnya. Nah, saat ini tahun anggaran 2021 segera berjalan, bagi kepala daerah yang menemui kendala atau tersendat, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Karena memang itu tugas saya

Legislator PKS Desak Kementerian PUPR Benahi Kali Ciliwung

KUTIPAN

Berdasarkan pasal 10 dan 11 UU SDA, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola SDA pada wilayah sungai lintas provinsi seperti Sungai Ciliwung yang melintasi provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Surabaya (09/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera membenahi sungai Ciliwung yang menjadi kewenangannya berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

"Sebelum ada laporan warga soal sampah yang menumpuk di Sungai Ciliwung, saya minta PUPR segera bertindak melakukan pemeliharaan sungai sesuai dengan tupoksinya berdasarkan UU SDA," kata Sigit Sosiantomo, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS.

Berdasarkan pasal 10 dan 11 UU SDA, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengelola SDA pada wilayah sungai lintas provinsi seperti Sungai Ciliwung yang melintasi provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Kewenangan tersebut, imbuhnya, tidak hanya sebatas menetapkan kebijakan strategis, tapi juga dalam hal pendanaannya dalam APBN.

"Sangat disayangkan saat ini masih banyak yang belum memahami bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan sungai-sungai utama yang melintasi beberapa provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini PUPR sesuai dengan UU SDA. Mungkin kedepan sosialisasi UU ini harus lebih masif sehingga masing-masing pihak terkait bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang digariskan dalam UU," kata

Sigit.

Untuk wilayah DKI, tahun 2021 ini PUPR mengalokasikan beberapa kegiatan pengelolaan Sungai Ciliwung mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, pengendalian banjir hingga pemeliharaan rutin sungai.

Adapun anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk pengelolaan Sungai Ciliwung mencapai ratusan miliar, seperti untuk pembangunan sudetan Ciliwung sebesar Rp 145 Miliar, pengendalian banjir Rp 28 Miliar, Review Siaga Banjir Rp 1,4 Miliar dan pemeliharaan rutin Sungai Ciliwung sebesar Rp2 Miliar.

"Anggaran untuk Sungai Ciliwung di wilayah DKI cukup besar. Saya minta Dirjen SDA untuk segera membenahi sungai Ciliwung, jangan sampai ada keluhan apalagi laporan warga soal sampah yang tidak bisa bergerak. Gunakan saja anggaran rutin pemeliharaan Sungai Ciliwung yang sudah disiapkan dalam APBN," kata Sigit.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Sangat disayangkan saat ini masih banyak yang belum memahami bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan sungai-sungai utama yang melintasi beberapa provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini PUPR sesuai dengan UU SDA. Mungkin kedepan sosialisasi UU ini harus lebih masif sehingga masing-masing pihak terkait bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang digariskan dalam UU,"

Aleg PKS: Jatuhnya SJ-182 Harus Jadi Dasar Evaluasi Seluruh Maskapai Penerbangan

KUTIPAN

Mataram (10/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ 182 yang hilang kontak pada hari Sabtu (09/01/2021) pukul 14.40 WIB.

Pesawat yang berisi 50 penumpang dan 12 orang kru tersebut di perkiraan jatuh antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI ini berharap operasi SAR dapat berjalan lancar yang diprioritaskan untuk evakuasi korban, setelah itu baru fokus kepada pencarian kotak hitam pesawat.

"Jatuhnya pesawat ini tentunya berpotensi memukul lebih jauh industri transportasi udara yang sudah mengalami penurunan sejak adanya pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu evakuasi korban yang

diikuti dengan recovery kotak hitam pesawat harus dilakukan secara cepat," ungkap pria yang akrab disapa SJP.

Hal ini, lanjutnya, agar proses investigasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat dapat segera dilakukan dan rekomendasi perbaikan dari KNKT dapat segera diberikan untuk menghindari kecelakaan lainnya.

"Apalagi beberapa waktu lalu Boeing sempat mengeluarkan peringatan terkait pesawat Boeing 737-500 yang telah diparkir selama tujuh hari berturut-turut rawan mengalami mati mesin di udara

akibat korosi pada katup udaranya," urainya.

Selain itu, tambahnya, perangkat ELT yang tidak memancarkan sinyal menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dalam investigasi, sebab perangkat ini seharusnya berfungsi secara otomatis ketika terjadi benturan atau apabila terendam air.

"Semua ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan oleh pihak maskapai bahwa terhadap pesawat tersebut telah dilakukan perawatan sebagaimana mestinya.

Walaupun tentunya faktor-faktor lainnya seperti faktor cuaca juga harus diinvestigasi apakah turut berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Karena biasanya kecelakaan pesawat merupakan rangkaian dari beberapa kejadian, sehingga tidak disebabkan oleh satu faktor saja," papar Anggota DPR asal NTB ini.

Selain itu, kata SJP, faktor kebijakan atau regulasi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kejadian ini.

"Telah banyak contoh ketidaktegasan Pemerintah



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

Semua ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan oleh pihak maskapai bahwa terhadap pesawat tersebut telah dilakukan perawatan sebagaimana mestinya

terhadap maskapai penerbangan, misalnya terkait masalah kompensasi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang tidak kunjung selesai hingga terjadinya kecelakaan lain pada

hari ini adalah salah satu contoh lemahnya kontrol Pemerintah terhadap maskapai," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Amin Ak Dorong BUMN Pangan Perkuat Riset Kedelai

KUTIPAN

Surabaya (10/01) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengingatkan janji Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memperkuat riset dan pengembangan (R & D) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk BUMN Pangan pascarestrukturisasi.

Salah satu pekerjaan rumah mendesak bagi BUMN Pangan saat ini adalah mendorong produktivitas kedelai lokal yang saat ini hanya separuh dari produktivitas kedelai impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas kedelai lokal saat ini hanya 1,5 ton – 2 ton per hektare. Sedangkan produktivitas kedelai impor mencapai 4 ton per hektare.

Sementara itu, data IPB University mengungkapkan, sekitar 70 persen kedelai dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun.

Dalam sejarah, puncak produksi kedelai lokal terjadi tahun 1992 silam yang mencapai 1,87 juta ton. Sehingga jika Indonesia mampu kembali ke produksi 1,8 juta ton per tahun, maka impor kedelai hanya sekitar 1 juta ton saja.

Amin pun yakin, jika bersungguh-sungguh ingin membangun kemandirian pangan, BUMN Pangan mampu mewujudkan misi tersebut.

“BUMN Pangan harus memperkuat riset kedelai dan bersinergi dengan perguruan tinggi maupun Litbang Pertanian untuk menghasilkan benih unggul. Saya dengar, Balitbang Pertanian sudah mampu menghasilkan benih dengan produktivitas 3 – 3,5 ton per ha, harusnya teknologi

ini bisa diadopsi dan dikembangkan bersama,” ujar Amin.

Selain problem produktivitas, faktor harga jual di tingkat petani dinilai berpengaruh besar terhadap pengembangan kedelai lokal. Oleh karena dianggap tidak menguntungkan, petani pun memilih menanam komoditas lain. Maka penguatan riset kedelai, kata Amin, juga harus didukung kebijakan yang bisa menghasilkan model budidaya kedelai yang efisien dan ekonomis.

“Efisiensi produksi akan menjadi insentif agar petani memperoleh pendapatan yang lebih baik, sehingga mereka bergairah menanam kedelai,” tutur Amin.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, biaya produksi kedelai berkisar antara Rp9 juta – Rp9,5 juta per ha. Jika produktivitas hanya 1,5 ton maka, biaya produksi per ton mencapai Rp6,3 juta atau sekitar Rp6.300 per kg. Sedangkan jika produktivitasnya mencapai 2 ton/ha, maka biaya produksi bisa ditekan menjadi Rp4,75 juta per ton atau Rp4.750 per kg.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

“BUMN Pangan harus memperkuat riset kedelai dan bersinergi dengan perguruan tinggi maupun Litbang Pertanian untuk menghasilkan benih unggul. Saya dengar, Balitbang Pertanian sudah mampu menghasilkan benih dengan produktivitas 3 – 3,5 ton per ha, harusnya teknologi ini bisa diadopsi dan dikembangkan bersama.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



NAPAK TILAS

SANTRI DI PKS

ANSORY SIREGAR

Biografi

- **Nama Lengkap :**
H. Ansory Siregar, Lc
- **Tempat, Tanggal Lahir :**
Bangun Purba, 10 Juni 1965
- **Jabatan :**
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara III

Pendidikan di Pesantren

- **Pondok Modern Darussalam Gontor**
Ponorogo, lulus tahun 1987.
Salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat.

Aleg PKS: Pemerintah Harus Terbuka Soal Gugatan Rp 39,5 triliun Perusahaan AS

KUTIPAN

Jakarta (08/01) — Terkait gugatan Anadarko Petroleum Corporation senilai Rp 39,5 triliun, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait masalah yang terjadi.

Menurut Mulyanto nilai gugatan perusahaan Amerika itu tidak main-main karena Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp 39,5 triliun akibat pembatalan perjanjian impor LNG 1 juta ton (MTPA) pertahun dalam jangka waktu 20 tahun dari Mozambik pada Februari 2019.

Mulyanto meminta Pemerintah agar lebih akurat dalam menyusun perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi.

Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian atau miss match seperti kasus listrik PLN yang over supply mendekati 50%. Saat produksi listrik berlebih PLN malah membangun pembangkit

dengan utang yang mencapai Rp 500 triliun.

"Terkait komoditas gas ini juga serupa. Di saat produksi LNG kita surplus, sehingga memungkinkan ekspor, Pertamina justru mengimpor gas ini dalam jumlah besar. Logikanya tidak pas. Padahal diketahui, bahwa transaksi berjalan perdagangan migas kita terus tekor setiap tahun. Semestinya yang dilakukan bukanlah impor gas, tetapi ekspor," papar Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini minta Pemerintah menegur Pertamina yang ingin mengambil keuntungan dengan menabrak logika perdagangan komoditas energi selama ini.

Secara umum strategi

dasar kita adalah menggenjot lifting migas, sehingga kita dapat semakin baik memenuhi kebutuhan migas domestik dan terus mengurangi impor migas, yang dengan itu defisit transaksi berjalan migas dapat direduksi. Syukur-syukur kalau bisa surplus. Bukan malah memperbesar defisit transaksi berjalan melalui impor LNG," tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Pertamina lalai menganalisis data kebutuhan gas dalam negeri. Akibatnya perusahaan plat merah itu harus menghadapi gugatan dengan nilai yang tidak sedikit.

"Seperti diketahui, sebelum datangnya pandemi Covid-19 sudah muncul kelesuan dalam permintaan energi untuk industri, apalagi setelah terjadi pandemi, yang sampai hari ini belum berakhir, permintaan energi di sektor industri semakin melemah," tandas Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Banten III ini.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

"Nilai gugatan perusahaan Amerika itu tidak main-main karena Pertamina harus membayar kerugian sebesar Rp 39,5 triliun akibat pembatalan perjanjian impor LNG 1 juta ton (MTPA) pertahun dalam jangka waktu 20 tahun dari Mozambik pada Februari 2019. Pemerintah agar lebih akurat dalam menyusun perencanaan pertumbuhan kebutuhan energi.

PKS Desak Subsidi Energi Bagi Rakyat Kecil

Anggaran Subsidi LPG 3 Kg (Rp Triliyun)



- Merujuk pada realisasi anggaran
- Merujuk pada pagu APBN

■ Penurunan Subsidi LPG 3 Kg/Tahun

- 2018-2019 : Rp **100 Milyar**
- 2019-2020 : Rp **7,4 Triliyun**
- 2020-2021 : Rp **12,8 Triliyun**

Sumber : Laporan APBN 2020

■ Alokasi Anggaran Subsidi Solar Tiap Tahun (Rp/Liter) :

- 2018-2018 (Juni) : Rp **1.500,-**
- 2018 (Juni)-2019 : **TETAP**
- 2019-2020 : Rp **1.000,-**
- 2020-2021 : Rp **500,-**

Sumber : Migas.esdm.go.id

Anggaran Subsidi Solar (Rp/Liter)



Investigasi Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI

HNW: Kok, Bukan Pelanggaran HAM Berat ?

KUTIPAN

Jakarta (09/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi dan mempertanyakan rekomendasi hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap tewasnya 6 laskar FPI pengawal Habib Rizieq Syihab.

Dalam keterangannya, Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan sejumlah laskar Front Pembela Islam (FPI) hanya sebagai 'pelanggaran HAM', dan tidak dinyatakan sebagai 'pelanggaran HAM berat'.

Padahal, lanjut HNW, Komnas HAM sendiri menyebutkan bahwa pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing.

"Itu jelas termasuk sebagai tindakan extra judicial killing yang disebut oleh UU HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat," tuturnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (09/01).

HNW mengutip ketentuan Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, 'Yang dimaksud dengan 'pelanggaran hak asasi manusia yang berat' adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).'

Maka, wajar saja bila beberapa NGO seperti IPW, Amnesty Internasional, YLBHI

dan KontraS juga menyimpulkan bahwa penembakan mati terhadap laskar FPI pengawal HRS termasuk extra judicial killing, yang masuk dalam kategori pembunuhan HAM berat.

"Diharapkan dengan status pelanggaran HAM berat, maka pengusutan lebih serius, dan aturan hukum soal pelanggaran HAM lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Karena Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi, yang mempunyai UUD yg sangat mementingkan perlindungan dan pelaksanaan HAM," ungkapnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan apabila kasus ini dinyatakan pelanggaran HAM Berat, maka sesuai dengan mekanisme dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka penyelidikan Komnas HAM tersebut bisa langsung diteruskan ke Jaksa Agung untuk segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Mekanisme ini lebih adil, karena tidak melibatkan institusi yang anggotanya diduga melanggar HAM dalam kasus ini, yaitu kepolisian" ujarnya.

Selain itu, HNW juga menuturkan bahwa sebaiknya Komnas HAM juga menjelaskan apakah pembunuhan laskar FPI yang telah masuk dalam kategori pelanggaran HAM juga sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebab bila merujuk kepada Pasal 9 huruf a dan huruf f UU No. 26 Tahun 2000



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Diharapkan dengan status pelanggaran HAM berat, maka pengusutan lebih serius, dan aturan hukum soal pelanggaran HAM lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Karena Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi, yang mempunyai UUD yg sangat mementingkan perlindungan dan pelaksanaan HAM."

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka patut diduga telah terjadi peristiwa pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan secara sistemik, terhadap 6 laskar FPI itu.

"Peristiwa penembakan mati itu dilakukan setelah adanya penguntitan yang

dilakukan oleh aparat dan bukan aparat. Selain itu, ada pula fakta yang terungkap bahwa saksi yang merekam dalam HP diminta oleh Polisi untuk menghapus rekaman tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Akurasi Data Penerima Bansos Bermasalah, Iskan Dorong Mensos **segera Selesaikan**

KUTIPAN

Jakarta (13/01) — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (11/01/2021).

Kedatangan Risma itu disebut berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial (bansos) terkait virus Covid-19.

Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mendorong Menteri Sosial, Risma, yang baru dilantik agar segera menyelesaikan permasalahan Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ini permasalahan fundamental, maka harus segera diselesaikan. Kan sudah jelas tuh bahwa KPK menuangkannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak

pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" ungkapnya.

Menurut Iskan, apa yang dilakukan Mensos sudah baik, salah satunya berkoordinasi dengan KPK kemarin.

"Kami mendorong Ibu Risma agar cepat tanggap dalam perumusan penyelesaian masalah data DTKS ini, karena ini masalah turun-temurun yang tak kunjung selesai, karena DTKS ini menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos. Hadirnya beliau dalam rangka koordinasi dengan KPK menunjukkan bahwa mudah-mudahan beliau punya tekad penuh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia salah satunya melalui program bantuan sosial atau Bansos," jelas Iskan.

Selain itu, lanjut Iskan,

surat rekomendasi pada hasil kajian KPK per tanggal 3 desember disebutkan bahwa KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya.

"Jadi, kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu, Selain 16 juta data tidak ada NIK, ada juga 1,06 juta NIK ganda dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal masih ada di DTKS, itu hasil pemadanan Dukcapil berdasar kajian KPK", ungkap Iskan mengutip pernyataan Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta.

Maka dari itu, kata Iskan, Pemadanan data dengan NIK ini, bisa membantu pemerintah untuk memvalidasi ketepatan data penerima bantuan.

"Kementerian/lembaga dan pemda khususnya dalam program bansos ini bisa menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada



Foto : dpr.go.id

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Kami mendorong Ibu Risma agar cepat tanggap dalam perumusan penyelesaian masalah data DTKS ini, karena ini masalah turun-temurun yang tak kunjung selesai, karena DTKS ini menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos"

masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Juga mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasinya.

"Untuk itu,

Kementerian/lembaga dan Pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera," pungkasnya mengakhiri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Cabut!

Ancaman Denda Rp 5 Juta untuk yang menolak divaksin

ANSORY SIREGAR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Ansory Siregar: Jika Vaksin Tidak Bagus **Harga Gratis** pun Orang Tidak Akan Mau

KUTIPAN

Ansory juga mengatakan seharusnya pemerintah menetapkan jadwal vaksin menunggu hasil uji klinis setidaknya beberapa minggu lagi agar tidak ada kontra yang timbul dari masyarakat, begitu pula dengan uji klinis yang dikeluarkan oleh BPOM yang seharusnya tidak didesak.

Jakarta (14/01) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Ansory Siregar menekan Pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang tidak ingin disuntikkan vaksin pada saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT. Biofarma

Menurut Ansory, memberi ancaman bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19.

“Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab kalau pun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka

mau disuntik. Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau. Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya,” ucap Ansory yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKS.

Ansory juga mengatakan seharusnya pemerintah menetapkan jadwal vaksin menunggu hasil uji klinis setidaknya beberapa minggu lagi agar tidak ada kontra yang timbul dari masyarakat, begitu pula dengan uji klinis yang dikeluarkan oleh BPOM yang seharusnya tidak didesak.

“BPOM mempunyai hak untuk bertindak tegas kepada pemerintah jika uji klinis belum keluar. BPOM sudah dua kali memaparkan bahwa hasil uji klinis akan keluar lima belas sampai satu bulan lagi. Seharusnya bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan vaksinasi tanggal tiga belas, tetapi yang menentukan vaksinasi seharusnya dari BPOM. Untuk ke depan kita semua harus mengikuti alur,” tegas Ansory.



Foto : dpr.go.id

H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



“Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab kalau pun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka mau disuntik. Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau. Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya

Mufida Tegaskan Pemerintah Wajib Pastikan Keselamatan PMI di 17 Negara Tujuan

KUTIPAN

Mufida mengusulkan agar PMI yang berangkat adalah yang sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Sebab, mereka yang pernah bekerja di luar negeri akan lebih mudah melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi seperti ini.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan 17 negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendukung pengiriman PMI di tengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Tanah Air.

Meski demikian, Mufida mengingatkan agar pemerintah menjamin keselamatan PMI di 17 negara tujuan karena saat

ini pandemi Covid-19 baik di Tanah Air maupun banyak negara masih tinggi

"Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19 yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan sosialisasikan dengan massif," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Mufida mengusulkan agar PMI yang berangkat adalah yang sudah memiliki pengalaman bekerja di luar

negeri. Sebab, mereka yang pernah bekerja di luar negeri akan lebih mudah melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi seperti ini.

"Kalau yang belum pengalaman akan dua kali adaptasi, pertama bisa jadi adaptasi dengan kultur negara dan pekerjaan. Kedua adaptasi dengan pandemi di luar negeri," papar dia.

Mufida juga meminta pengiriman PMI pada masa pandemi dengan fasilitas proteks dari pemerintah yang lebih komprehensif, termasuk fasilitas tes PCR yang standar luar negeri sebelum keberangkatan. Agar tidak ada lagi penolakan hasil PCR atau pengulangan PCR karena dianggap tidak akurat.

"Pastikan yang dikirim tidak punya riwayat penyakit bawaan kemudian soal tes wajib PCR. Jangan sampai peristiwa ditutupnya Taiwan sebagai negara tujuan kembali terulang. Calon PMI yang akan dirugikan," ujar dia.

Sementara untuk solusi bagi calon PMI yang belum berpengalaman adalah pemberian insentif bagi UMKM dengan penguatan tenaga kerja mandiri. "Pelatihan tenaga kerja mandiri untuk menuju UMKM mandiri perlu mendapat insentif tinggi di saat banyak anak negeri kehilangan pekerjaan," ujar Mufida



Foto: dpr.go.id

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19 yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan sosialisasikan dengan massif."

Legislator PKS: Pemerintah **Tak Seharusnya** Denda Masyarakat yang Tak Mau Divaksin

KUTIPAN

Netty mengkhawatirkan adanya keterpaksaan dan tekanan waktu yang dirasakan oleh BPOM dalam mengeluarkan hasil uji klinis serta memastikan keamanan vaksin yang disebabkan oleh desakan rencana pemerintah

Jakarta (08/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengingatkan pemerintah untuk memenuhi Emergency Use of Authorization terkait vaksin yang akan digunakan. Netty menilai pemerintah terlalu terburu-buru dalam menentukan waktu penggunaan vaksin ini disaat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum tersedia.

Netty juga mengkhawatirkan adanya keterpaksaan dan tekanan waktu yang dirasakan oleh BPOM dalam mengeluarkan hasil uji klinis serta memastikan keamanan vaksin yang disebabkan oleh desakan rencana pemerintah.

Netty memaparkan prosentase masyarakat yang percaya terhadap vaksin ini masih berada di angka 66 persen. Hal ini juga menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu terhadap vaksin ini dengan publikasi secara transparan terkait hasil uji klinis yang telah dilakukan oleh Badan POM.

"Saya dan teman-teman tidak ingin ada tekanan pada Badan POM sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh Presiden yang memang ranahnya memastikan setiap produk obat dan makanan termasuk vaksin terjamin keamanannya. Kalau kita berbicara tentang vaksin, banyak pertanyaan dan keraguan yang masih harus

dijawab dengan hasil uji klinis terhadap 1.620 relawan," ujar Netty yang juga Ketua Satgas Covid FPKS DPR RI.

Netty menilai pemerintah juga tidak seharusnya memberikan ancaman dengan menerapkan denda kepada masyarakat yang menolak disuntikkan vaksin. Pemerintah seharusnya mengutamakan edukasi, transparansi, serta pemahaman kepada masyarakat terkait vaksin ini.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijunjung tinggi, dipegang, dan dijadikan prinsip oleh pemerintah dalam menggulirkan apapun bentuk kebijakan dan pilihan tindakan bagi keselamatan rakyat Indonesia," ungkap Netty sebagai penutup.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saya dan teman-teman tidak ingin ada tekanan pada Badan POM sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh Presiden yang memang ranahnya memastikan setiap produk obat dan makanan termasuk vaksin terjamin keamanannya. Kalau kita berbicara tentang vaksin, banyak pertanyaan dan keraguan yang masih harus dijawab dengan hasil uji klinis terhadap 1.620 relawan.



Homeschooling

“Sampai saat ini homeschooling memang belum menjadi fokus perhatian bagi Kemendikbud. Maka adanya situasi yang memaksa jutaan siswa terlibat -dalam tanda petik- homeschooling, bisa menjadi langkah baru agar Kemendikbud bisa menyiapkan berbagai perangkat untuk membantu orang tua mendampingi anak belajar selama pandemi dan menjadi pedoman jangka panjang bagi pelaku homeschooling

Hj. *Ledia Hanifa* S.Si., M.Psi.T

kegiatan homeschooling sendiri diakui secara resmi dalam legalitas aturan perundangan. Baik lewat Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 129 Tahun 2014 tentang 'Sekolah Rumah

Anggota Komisi X FPKS: Program Belajar Dari Rumah **Butuh Modul** Bagi Orangtua

KUTIPAN

Jakarta (13/01) — Meski SKB 4 Menteri pada akhir 2020 lalu menyebutkan dimungkinkannya pembelajaran tatap muka dimulai pada semester genap 2021,

pada kenyataannya masih lebih banyak wilayah yang memutuskan menunda pembelajaran tatap muka di sekolah mengingat pandemi Covid-19 masih mengganas.

Berdasarkan informasi dari Kemendikbud hanya 14 Propinsi siap melakukan pembelajaran tatap muka pada semester genap 2021 yang dimulai Januari ini, itupun tidak melingkupi keseluruhan daerah di setiap propinsi.

Jawa Barat misalnya, meski siap melakukan pembelajaran tatap muka tetapi hanya sekitar 35 persen sekolah se-Jawa Barat yang berasal dari 12 Kabupaten/Kota yang siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Selengkapnya dari 15 Kabupaten/Kota lain tetap melakukan Belajar Dari Rumah.

Ini berarti mayoritas siswa, guru dan orang tua kembali harus kembali menjalani dan berkreasi dengan pola pembelajaran jarak jauh

Terkait dengan kegiatan Belajar Dari Rumah ini Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menceritakan banyaknya keluhan dari orang tua terkait kegagalan mereka saat mendampingi anak belajar dari rumah di samping persoalan keterbatasan gawai, sinyal dan kuota.

"Keluhan orangtua ini banyak disampaikan kepada saya melalui pesan singkat, akun media sosial, tanya jawab webinar maupun saat kunjungan langsung ke dapil. Kegagapan ini dapat dimengerti mengingat orang tua tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun

ketrampilan mendidik sebagaimana para guru. Karena itu pemerintah pun perlu memberikan dukungan khusus bagi para orang tua dalam mendampingi siswa belajar," pungkas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Ledia menyadari bahwa kondisi belajar mengajar yang ada saat ini memang tidak ideal dan memiliki banyak tantangan, namun semua itu harus dihadapi bersama satu demi satu dan dikreasikan agar tetap bisa memberikan hasil yang optimal bagi pendidikan anak.

"Pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah ini sudah hampir genap kita alami selama satu tahun. Apresiasi saya kepada Mas Mendikbud beserta jajarannya yang sudah berupaya meminimalisir hambatan dan tantangan terkait persoalan teknis, prasarana dan sarana pendidikan di masa pandemi. Tapi perjalanan masih panjang. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan sekolah bisa benar-benar siap melakukan pembelajaran tatap muka. Karenanya support pada



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Keluhan orangtua ini banyak disampaikan kepada saya melalui pesan singkat, akun media sosial, tanya jawab webinar maupun saat kunjungan langsung ke dapil. Kegagapan ini dapat dimengerti mengingat orang tua tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun ketrampilan mendidik sebagaimana para guru

orang tua kini harus dipikirkan secara lebih detail dan strategi," terangnya.

Sekretaris Fraksi PKS ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa lebih menguatkan dukungan program Belajar Dari Rumah kepada para orang tua dengan

menyiapkan baik panduan maupun modul bagi orang tua.

"Selama ini kita mengetahui ada cukup banyak panduan dan modul bagi para guru dan pendidik, namun bagi orang tua memang belum banyak.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Fikri Faqih: Komisi X Dukung GTK Honorer 35 tahun ke atas Diangkat PNS Tanpa Tes

KUTIPAN

Jakarta (13/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendukung guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes.

“Komisi X DPR RI mendukung aspirasi para Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan,” ujar Fikri membacakan hasil keputusan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan perwakilan guru dan tenaga kependidikan secara virtual, Rabu (13/01/2021).

RDPU tersebut digelar Komisi X DPR untuk mendengarkan aspirasi dari beberapa forum guru dan tenaga kependidikan, antara lain: Komite Nasional ASN (Non-ASN), Juru Bicara Guru dan Tendik Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas,

Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR mengapresiasi para perwakilan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer dari seluruh Indonesia yang telah menyampaikan aspirasi dan bahan paparan terkait tuntutan mereka.

Aspirasi yang disampaikan kepada Komisi X antara lain: (1) pemerintah bersama DPR RI diminta untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama pasal terkait pengangkatan CPNS. (2) Forum juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan perundangan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai

pengangkatan PNS tanpa tes bagi guru dan tendik honorer di atas 35 tahun. (3) mereka juga menolak skema pengangkatan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya honorer non kategori umur 35 tahun ke atas, serta (4) meminta Kemendikbud RI agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan Guru Agama.

Atas aspirasi tersebut, Fikri menyatakan, Komisi X menerima semua aspirasi yang telah dipaparkan.

“Menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan, kemudian akan merindakanlanjuti semua aspirasi tersebut kepada Pemerintah terutama Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI, maupun Komisi terkait lainnya,” ucap Politisi PKS ini dalam keputusan rapat.

Lebih jauh, Komisi X DPR RI menyatakan mendukung aspirasi para Guru Tenaga



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Komisi X DPR RI mendukung aspirasi para Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan

Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan.

“Dengan tetap

mempertimbangkan pengabdian, keadilan dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan,” imbuh Fikri. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Politisi PKS Minta Pemerintah **Pastikan Kebutuhan Harian Masyarakat Selama PPKM**

KUTIPAN

Jakarta (08/01) — Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 - 25 Januari 2021.

Kebijakan ini diterapkan untuk menekan penularan covid-19 yang semakin melonjak serta makin penuhnya kapasitas rumah sakit di berbagai daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk memastikan tersedianya dan terjangkau harga dari kebutuhan harian masyarakat selama masa PPKM.

Menurut Junaidi, Pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat kecil yang terdampak dari kebijakan tersebut.

"Kebijakan PPKM harus dibarengi dengan jaminan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan harian masyarakat," ungkap Junaidi di Jakarta, Jumat, (08/01)

Satgas penanganan covid-19 mencatat saat ini kasus aktif

covid-19 sebanyak 114.766 orang yang dinyatakan positif dan sedang menjalani perawatan.

Selain itu ketersediaan tempat tidur di beberapa daerah sudah melebihi 70 persen diantaranya DKI Jakarta 84,74%, Banten 84,52%, Yogyakarta 83,36%, Jawa Barat 79,77%, Jawa Timur 78,41%, Jawa Tengah 76,27%.

"Ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis ini agar bisa menjadi perhatian pemerintah agar responsif dalam memberikan solusi" kata Junaidi.

Ketua DPP PKS Sumbagsel ini melanjutkan, pemerintah juga agar terus aktif mengajak masyarakat untuk taat dan patuh dalam melaksanakan Prokes (protokol kesehatan) yang baik dan benar, penerapan

Prokes kali ini harus dilakukan secara ketat, disiplin, dan konsisten.

Sosialisasi serta edukasi mengenai protokol kesehatan agar dilakukan secara massif demi meminimalisir penyebaran virus corona.

Anggota legislatif asal Lampung ini juga menegaskan agar pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat termasuk juga dari para pakar dan ahli di berbagai sektor yang terdampak terkait kebijakan PPKM.



Pemerintah terus aktif mengajak masyarakat untuk taat dan patuh dalam melaksanakan Prokes (protokol kesehatan) yang baik dan benar, penerapan Prokes kali ini harus dilakukan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Sosialisasi serta edukasi mengenai protokol kesehatan agar dilakukan secara massif demi meminimalisir penyebaran virus corona.



Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang III
Tahun Sidang 2020-2021



Anggota Komisi IX DPR RI

**Anggota FPKS
Dukung Penuh
Pengembangan
Vaksin Merah Putih**

“Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin merah putih yang telah mencapai 60 persen dari skala laboratorium. Saya memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin tersebut.”

Alifudin Sampaikan Duka cita Fraksi PKS terkait Hilangnya Kontak Sriwijaya Air

KUTIPAN

Alifudin yang juga berasal dari Pontianak berharap para keluarga korban bisa diberikan kemudahan dalam akses informasi dan bantuan dari pihak terkait dalam proses menunggu info hasil pencarian tim basarnas.

Jakarta (11/01) — Rapat Paripurna DPR RI pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020/2021 digelar hari senin (11/1/2021) di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Dalam kondisi pandemi covid-19 fraksi PKS menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bagi yang hadir secara offline.

Fraksi PKS dihadiri 4 orang secara offline, hal ini merupakan kesepakatan dari FPKS dalam menghadiri rapat-rapat sidang yang dilaksanakan di gedung DPR RI selama masa pandemi.

Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS yang hadir secara langsung, menyampaikan rasa Duka yang

mendalam dari fraksi PKS terkait musibah hilang kontak pesawat sriwijaya dari Jakarta menuju Pontianak.

"Kami dari Fraksi PKS mengucapkan rasa Duka yang mendalam atas musibah hilang kontak pesawat Sriwijaya tujuan Pontianak, semoga keluarga penumpang pesawat Sriwijaya tersebut diberikan kekuatan dalam kesabaran oleh Allah SWT," ujar Alifudin di hadapan pimpinan sidang paripurna.

Alifudin yang juga berasal dari Pontianak berharap para keluarga korban bisa diberikan kemudahan dalam akses informasi dan bantuan dari pihak terkait dalam proses menunggu info hasil pencarian tim basarnas.

"Saya pribadi sebagai warga Pontianak sangat merasa sekali duka yang dirasa oleh para keluarga, saya harap akses informasi dan fasilitas selama menunggu info hasil pencarian tim bencana bisa dibantu oleh pihak pihak terkait," tambahnya.

Sebagai informasi, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak jatuh di perairan sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Utara Jakarta, pukul 14.00 WIB, Sabtu (9/1)

Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru.

Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.



H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Saya pribadi sebagai warga Pontianak sangat merasa sekali duka yang dirasa oleh para keluarga, saya harap akses informasi dan fasilitas selama menunggu info hasil pencarian tim bencana bisa dibantu oleh pihak pihak terkait

Anggota FPKS **Dukung** **Penuh** Pengembangan Vaksin Merah Putih

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Guna mendukung kemandirian bangsa, Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh mendukung pengembangan vaksin merah putih

Menurutnya, Indonesia nantinya tidak perlu ketergantungan vaksin impor karena mampu memproduksi vaksennya sendiri. Hal tersebut dikatakannya bisa menjadi pengubah situasi dalam pandemi Covid-19 ini.

“Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin merah putih yang telah mencapai 60 persen dari skala laboratorium. Saya memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin tersebut,” ujar Alifuddin dalam interupsinya pada pembukaan rapat paripurna masa sidang III di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Untuk melakukan pengembangan vaksin, Indonesia membentuk konsorsium yang terdiri dari

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, LIPI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga yang dipimpin oleh Prof. dr. Ali Ghufon untuk mempersiapkan Vaksin Merah Putih.

Vaksin Merah Putih dikembangkan dengan metode rekombinan, artinya tidak seluruh virus digunakan tetapi hanya bagian-bagian tertentu dari virus yang dianggap penting kemudian diperbanyak dan dijadikan antigen. Alifuddin berharap Vaksin Merah Putih bisa diproduksi akhir tahun 2021. Hal ini demi memastikan keamanan vaksin Covid-19 dan efektivitasnya karena dinilai menjadi vaksin jangka panjang.

Selain itu, politisi Fraksi PKS ini juga meminta rencana vaksinasi yang akan segera

dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi semua tahapan proses uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan berbasis ilmiah. Kemudian menurutnya, vaksin harus lulus uji klinis guna melihat efikasinya dan memenuhi kriteria aman, berkhasiat, serta bermutu untuk masyarakat yang divaksin.

“Selain itu juga vaksin juga telah harus mendapat standar emergency use authorization (EUA) dari BPOM yang bekerja sama secara independen, transparan, dan penuh tanggung jawab dunia dan akhirat. Vaksin yang digunakan di Indonesia harus memenuhi semua tahapan proses uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan berbasis ilmiah,” tukasnya. (er/es)



Foto: dpr.go.id

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

“Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin merah putih yang telah mencapai 60 persen dari skala laboratorium. Saya memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin tersebut.”

RAPAT PARIPURNA

Pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang III
Tahun Sidang 2020-2021



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

● INTERUPSI

Aleg PKS: Pemerintah Harus memperbaiki 'Roadmap' Kebutuhan Pangan Nasional

Kebutuhan pokok pangan nasional pada padi, jagung, dan kedelai (pajali) harus menjadi perhatian serius dan tidak bisa kemudian menghiraukan salah satunya. "Kita punya kebutuhan pokok yang disebut pajali (padi, jagung, kedelai). Padi diberi respon, diberi perhatian, jagung diberi perhatian, anggarannya meningkat, produksinya juga meningkat. Tetapi kedelai kemudian dilupakan

Aleg PKS: Pemerintah Harus Memperbaiki 'Roadmap' Kebutuhan Pangan Nasional

KUTIPAN

Agar pemerintah kembali menyusun roadmap ketahanan pangan kita, dengan kembali memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat kita, dengan menanam kedelai

Jakarta (11/1) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan mendesak pemerintah agar memperbaiki roadmap pembangunan ketahanan pangan nasional. Dia mengungkapkan, pada awal tahun ini masyarakat diresahkan dengan kelangkaan kebutuhan kedelai nasional, hal tersebut mengakibatkan produksi tempe dan tahu menjadi tersendat, karena selama ini Indonesia masih tergantung pada kedelai impor.

"Agar pemerintah kembali menyusun roadmap ketahanan pangan kita, dengan kembali memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat kita, dengan menanam kedelai," papar Johan saat menyampaikan interupsi pada

saat rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, kebutuhan pokok pangan nasional pada padi, jagung, dan kedelai (pajali) harus menjadi perhatian serius dan tidak bisa kemudian menghiraukan salah satunya. "Kita punya kebutuhan pokok yang disebut pajali (padi, jagung, kedelai). Padi diberi respon, diberi perhatian, jagung diberi perhatian, anggarannya meningkat, produksinya juga meningkat. Tetapi kedelai kemudian dilupakan," keluh Johan.

Wakil rakyat dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini mendesak pemerintah agar membuat perencanaan yang

jelas tentang kebutuhan pangan nasional agar tidak salah arah. Dia pun menyambut baik pidato Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani tentang ajakan gotong royong untuk membangun ketahanan nasional di masa pandemi ini.

Menurutnya kecukupan pangan sangat penting untuk meningkatkan imun di masa pandemi. Bahkan dia mengeluhkan, negara agraris tapi impor pangan dari luar negeri. "Menjadi lucu ketika kita adalah negara agraris, tapi mengimpor kedelai. Petani kita, UKM kita sudah sangat terdampak, jangan sampai kita salah lagi merespon," pungkas Johan. (eko/es)



Foto: dpr.go.id

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Kebutuhan pokok pangan nasional pada padi, jagung, dan kedelai (pajali) harus menjadi perhatian serius dan tidak bisa kemudian menghiraukan salah satunya.

"Kita punya kebutuhan pokok yang disebut pajali (padi, jagung, kedelai). Padi diberi respon, diberi perhatian, jagung diberi perhatian, anggarannya meningkat, produksinya juga meningkat. Tetapi kedelai kemudian dilupakan

BKSAP: Kita Ingin Indonesia Jadi Pemimpin di ASEAN

KUTIPAN

Jakarta (12/01) ---
Wakil Ketua BKSAP
DPR dari Fraksi PKS,
Mardani Ali Sera,

dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenu) RI (12/01/2021), dalam diskusi proyeksi luar negeri tahun 2021 di Komplek Parlemen mendorong Indonesia agar jadi pemimpin di ASEAN.

"Indonesia harus terus memperkuat diplomasi dan Kerjasama regional untuk menjadikan Indonesia kuat sebagai pemimpin di ASEAN," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR ini mendesak Kemenlu untuk melindungi masyarakat dan diaspora di luar negeri.

"Masyarakat kita di luar harus terpantau dan mendapatkan perhatian Pemerintah, Kita harus punya big data yang by name by address," ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani mendorong dunia Internasional dan PBB melalui Kemenlu RI untuk segera menuntaskan kasus Rohingya.

"Hingga saat ini tidak ada kemajuan yang jelas pembantaian dan Genosida etnis di Rakhine. Apalagi dalam kondisi Pandemi mereka lebih memprihatinkan. Kita harus terus mendorong agar mereka bisa pulang Kembali dan menghukum pejabat Myanmar yang terbukti menjadi dalang," katanya.

Terakhir Doktor Teknik mesin ini juga mendorong prioritas diplomasi 2021 untuk mengoptimalkan National Health Security dan pemulihan ekonomi dan pembangunan Indonesia kedepannya.

"Kita harus mendapatkan akses yang terbaik untuk Kesehatan dan bisa dikembangkan di negara kita agar seluruh masyarakat bisa pulih dari disaster besar ini. Selain itu juga kita harus terus memperkuat hubungan dengan negara-negara pasifik selatan agar menjadi tetangga yang ramah," pungkas Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

"Hingga saat ini tidak ada kemajuan yang jelas pembantaian dan Genosida etnis di Rakhine. Apalagi dalam kondisi Pandemi mereka lebih memprihatinkan. Kita harus terus mendorong agar mereka bisa pulang Kembali dan menghukum pejabat Myanmar yang terbukti menjadi dalang."



*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Syaikh Ali Saleh Mohammed Ali Jaber

Guru dan Pendakwah

Pada Kamis 14 Januari 2021 pk. 08.38 WIB
di RS Yarsi Jakarta

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Nevi Zuairina Adakan Pelatihan terhadap Ratusan Guru Tahfidz Binaan

KUTIPAN

Bukittinggi (12/01) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengadakan pelatihan guru-guru tahfidz agar mendapat metode mudah dalam menghafal qur'an semudah senyuman.

Acara ini diikuti sekitar 100 orang para guru yang merepresentasi kecamatan-kecamatan di daerah pemilihannya. Berlokasi di Bukittinggi, 10 Januari 2021, peserta mengikuti dengan khidmat acara pelatihan dari awal hingga akhir.

"Cita-cita saya setiap kecamatan di daerah pemilihan Sumatera Barat II, terbentuk satu rumah tahfidz setiap kecamatan. Target jangka panjangnya adalah, setiap rumah-rumah di Sumbar, ada satu orang minimal menghafal Qur'an. Dengan adanya para penghafal Qur'an ada di tiap rumah, semoga Sumbar menjadi negeri yang diberkahi", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan kepada para guru penghafal Qur'an, agar senantiasa konsisten dalam mendidik anak-anak penghafal qur'an. Karena usia anak-anak sebagai peserta didik menghafal, akan cenderung lebih cepat dan mudah menyelesaikan tiap juz hingga tamat.

Nevi mengatakan, bahwa para penghafal qur'an ini menjadikannya lebih utama jadi imam sholat. Ketika rumah-rumah diisi oleh para penghafal qur'an, sholat-sholat di rumah akibat pandemi akan tetap sempurna karena dipimpin oleh hafidz.

Legislator asal Sumbar ini menambahkan begitu tingginya

kedudukan para penghafal qur'an di mata Yang Maha Kuasa adalah berada pada akhir ayat yang dibaca. Syafaat pada penghafal qur'an ini sangat besar. Bahkan Tukang Sihirpun tidak akan mampu menghafal qur'an.

"Semoga anak-anak Indonesia yang muslim terpacu untuk menghafal Al Qur'an. Dengan di dampingi guru yang handal, anak-anak akan belajar lebih menyenangkan. Adanya para penghafal di rumah-rumah, maka setiap tempat di Sumbar akan Memunculkan kedamaian Hati sehingga rumah tempat tinggalnya senantiasa indah, Memiliki Cahaya yang lebih indah dari Matahari, dan akan disematkan Mahkota dan Jubah di hari kiamat.", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Semoga anak-anak Indonesia yang muslim terpacu untuk menghafal Al Qur'an. Dengan di dampingi guru yang handal, anak-anak akan belajar lebih menyenangkan. Adanya para penghafal di rumah-rumah, maka setiap tempat di Sumbar akan Memunculkan kedamaian Hati sehingga rumah tempat tinggalnya senantiasa indah, Memiliki Cahaya yang lebih indah dari Matahari, dan akan disematkan Mahkota dan Jubah di hari kiamat"

Rofik Salurkan Bantuan Untuk Bangun Ruang Kelas Baru SD IT Lentera Hati Kaligodang

KUTIPAN

Purbalingga (10/01) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto menyerahkan bantuan dana sebesar Rp. 100 Juta.

untuk pembangun ruang kelas baru SD IT Lentera Hati di Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Sabtu (09/01/2021).

Bantuan diterima oleh Ketua Yayasan Bakti Anak Negeri mewakili Kepala SD IT Lentera Hati Dwi Suciarto Setyabudi, dan disaksikan Dewan Pembina Yayasan Cahyo Susilo, Kades Kembaran Wetan Sumarno, komite sekolah dan sejumlah undangan lainnya.

Bantuan ini merupakan bantuan CSR BUMN, terelisasi atas kerjasama antara Komisi VII DPR RI dengan dengan mitra kerja dalam hal ini PT PLN (Persero).

"Sebagai anggota DPR RI, kami memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan." kata Rofik Anggota

DPR RI FPKS dari Dapil Jateng VII

"SD IT Lentera Hati memiliki visi sangat mulia menjadi sekolah Modern yang melahirkan generasi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan berprestasi. Tentu perlu dukungan dari semua pihak agar visi ini bisa tercapai." Tambahnya

Diharapkan bantuan ini dapat membantu pihak sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan memadai bagi para siswa di sekolah ini. Rofik juga berpesan agar bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dengan amanah dan profesional. Agar dana itu betul-betul bisa diwujudkan secara nyata.

"Saya sudah sampaikan kepada teman-teman agar jika ada bantuan dana harus

diserahkan sepenuhnya untuk masyarakat dan agar dikerjakan dengan baik," tegas Rofik.

Rofik mendoakan SD IT Lentera Hati ke depan terus berkembang dan bisa mencetak generasi yang berakhlak mulia dan menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan. "Mari bersama membangun Purbalingga agar semakin maju," ajaknya.

Selain memberikan bantuan untuk pembangunan ruang kelas, rofik juga memberikan perlengkapan protokol kesehatan berupa nutrisi, handsanitizer dan masker. Sekaligus memberikan hadiah untuk salah satu siswa bernama Zamir Althaf Arkana yang berhasil menjadi juara dalam Jambore Gambar 2020 yang diadakan oleh PT Bukit Asam.

Ketua Yayasan Dwi Suciarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rofik Hananto yang sudah membantu SD IT Lentera Hati memperoleh bantuan sebesar Rp 100 juta. "Kami sangat berterima kasih," katanya saat mewakili Kepala Sekolah SD IT.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Diharapkan bantuan ini dapat membantu pihak sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan memadai bagi para siswa di sekolah ini. Rofik juga berpesan agar bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dengan amanah dan profesional. Agar dana itu betul-betul bisa diwujudkan secara nyata.

Dia menjelaskan, perkembangan SD IT semakin bagus. Di tahun pertama berdiri yakni tahun 2015 hanya mempunyai 18 siswa. Dan di tahun 2021 ini menjadi 165 siswa. Tahun ini sekolah akan meluluskan siswa untuk pertama kali.

"Kami ingin mendirikan sekolah dengan sarana prasarana berupa bangunan 2 lantai dengan 10 ruang kelas dan 10 kamar kecil. Semoga bantuan ini bukan yang terakhir," harapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mengisi Webinar PsyLegis, Anis: Mahasiswa **Harus Selektif** Pilih Wakil Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (11/01) — Fakultas Psikologi Universitas Yarsi menggelar webinar PsyLegis dengan topik How Legislative Works On BPM ?

Jakarta (11/01) — Fakultas Psikologi Universitas Yarsi menggelar webinar PsyLegis dengan topik How Legislative Works On BPM ? Acara ini diselenggarakan pada Sabtu, (09/1/2021) dengan menghadirkan pembicara tunggal Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati.

Mengawali pemaparannya, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menjelaskan mengenai konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara) yang dianut dan dijalankan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.

"Konsep Trias Politika membagi kekuasaan kepada tiga pihak yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dengan Kepala Negara sebagai pemimpin Lembaga eksekutif yang

dibantu oleh para menteri yang memiliki wewenang masing-masing. Kekuasaan eksekutif tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945," terangnya.

Sementara kekuasaan legislatif, imbuhnya, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada wakil dari rakyat yang diberikan hak untuk membuat atau menyusun sebuah undang-undang.

"Kekuasaan legislatif dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Lembaga legislatif juga diberikan kewenangan untuk meminta keterangan yang sedang dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh eksekutif. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang digunakan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan yudikatif tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD

1945," papar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Melanjutkan pemaparannya, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai Lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai Lembaga eksekutif.

"Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat," tutur Anis.

"Sementara fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi inspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat," tambahnya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Anis mengurai alur pembuatan sebuah undang-undang baik undang-undang yang diajukan atas inisiatif DPR, DPD maupun pemerintah.

Rancangan undang-



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat."

undang yang pada hakikatnya merupakan inisiatif atau usulan dari masyarakat, dihimpu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk masa lima tahun sesuai masa tugas DPR. List RUU yang masuk dalam prolegnas kemudian dibagi dalam pembahasan tahunan yang disebut dengan prolegnas

prioritas.

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan dewan yang bertugas menghimpun prolegnas dan menentukan prolegnas prioritas.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Fungsi Pengawasan

dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila
**DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai
dengan kepentingan rakyat.**

Dr. Hj. *Anis Byarwati* S.Ag.,M.Si

Kunjungi Wisata Alam Jontor Kedungwaru Yang Didirikan Warga, **Toriq Beri Bantuan Sarana Sanitasi**

KUTIPAN

Tasikmalaya (11/01) — Jontor Kedungwaru merupakan potensi wisata alam di aliran sungai Ciwulan

Sejatinya Jontor Kedungwaru adalah bukit bebatuan kecil yang berada di jalur sungai Ciwulan yang berbatasan antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Jontor merupakan tanah milik warga, yang memiliki potensi wisata istimewa yakni berada tepat di aliran sungai Ciwulan dan jembatan gantung Kedunghalang dan Kedungwaru. Dan semenjak berdirinya jembatan gantung, situasi jalan penghubung tesebut menjadi ramai.

Mengetahui adanya obyek wisata alam baru di dapilnya. Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengunjungi Jontor Kedungwaru. Setelah bertemu dan menyerap aspirasi warga pelopor objek wisata Jontor, Ia memberikan bantuan dana untuk membangun sarana sanitasi.

“fasilitas sanitasi seperti toilet menjadi faktor penting dalam pelayanan sektor pariwisata. Beberapa survei menyebutkan, keberadaan toilet publik yang layak dan bersih bisa memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan”, ungkap Toriq.

Melihat potensi ini, warga mempelopori untuk menjadikan Jontor Kedungwaru sebagai objek wisata yang potensial di perbatasan kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Penanggung jawab kawasan wisata Jontor Kedungwaru menyebutkan meski fisik belum selesai, sudah banyak warga yang melintas melakukan swafoto dan acara kecil. Kondisi fisik wisata yang belum mencapai 60 persen, hanya baru bisa

menampung puluhan pengunjung saja.

Sumber dana untuk pembangunan kawasan wisata merupakan hasil swadaya masyarakat. Ada pula sumbangan dari para pengusaha kecil dan menengah yang berada disekitar kawalu berupa bambu, kayu, dan triplek untuk melengkapi kondisi bangunan.

Sebelumnya banyak investor yang mau berinvestasi di wisata Jontor Kedungwaru. Namun sejak Covid-19 mereka menunda investasi. Uniknya kondisi ekonomi yang belum stabil tidak menghalangi semangat warga untuk mengembangkan potensi wisata Jontor meski dilakukan secara sederhana.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“fasilitas sanitasi seperti toilet menjadi faktor penting dalam pelayanan sektor pariwisata. Beberapa survei menyebutkan, keberadaan toilet publik yang layak dan bersih bisa memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan”



Salurkan Bantuan Korban Longsor Sumedang, Nurhasan: Antisipasi Zona Rawan Longsor Susulan

KUTIPAN

Sumedang (13/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mengunjungi korban longsor di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat

Dalam kesempatan tersebut, Nurhasan menyampaikan duka mendalam serta keprihatinannya kepada segera keluarga korban longsor.

“Duka dan keprihatinan yang mendalam kita rasakan atas musibah ini. Kita minta pemerintah segera antisipasi daerah zona rawan longsor susulan, mengingat kondisi cuaca masih mengkhawatirkan”, ujar Nurhasan Zaidi, saat mengunjungi Posko Relawan PKS, Rabu (13/01/2021).

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengevaluasi faktor sebab dan dampak dari musibah ini. Terutama di daerah-daerah rawan longsor yang mengancam jiwa manusia, kebijakan pembangunan perumahan

harus dievaluasi ulang, rumah bisa dibeli berapapun tapi nyawa tidak ada gantinya”, imbuhnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumedang, Subang dan Majalengka ini juga mengatakan bahwa telah mengajukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik oleh Komisi VIII DPR RI untuk meninjau lokasi bencana tersebut bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait yang rencananya dijadwalkan akhir pekan ini.

Dalam kesempatan tersebut Nurhasan mengungkapkan belasungkawanya bagi para korban yang meninggal dunia serta menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana melalui Posko Tanggap

Bencana Relawan.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Insyaallah korban yang meninggal dunia syahid dijanjikan Allah dan diterima disisinya. Kita juga berdo'a semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta keshabaran” tuturnya.

“Alhamdulillah sejak hari pertama, Relawan PKS ikut turun bersama masyarakat di beberapa lokasi terdampak, ini tulus kita lakukan sebagai wujud cinta, kepedulian dan rasa sepenanggungan. Dan mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit menghibur dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah”, pungkasnya.

Seperti telah diketahui bahwa pada Sabtu petang lalu (09/01/2021) telah terjadi longsor yang disusun banjir di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung.

Sedikitnya 14 rumah rusak berat akibat ambruknya tebing setinggi 20 meter dan ratusan rumah terendam banjir lumpur.



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengevaluasi faktor sebab dan dampak dari musibah ini. Terutama di daerah-daerah rawan longsor yang mengancam jiwa manusia, kebijakan pembangunan perumahan harus dievaluasi ulang, rumah bisa dibeli berapapun tapi nyawa tidak ada gantinya”

Bencana tersebut juga menimbulkan belasan korban jiwa dari masyarakat dan sejumlah petugas serta relawan yang berusaha mengevakuasi korban terkubur longsor. Diantaranya adalah Kasi

Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang, Kasi Trantib Kecamatan Cimanggung, Danramil Cimanggung Kapten Setyo Pribadi dan petugas Basarnas.

Reses di Depok, Nur Azizah Beri Santunan Dhuafa Warga Konghuchu

KUTIPAN

Depok (13/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melakukan dialog bersama masyarakat Konghucu Kota Depok di Jl. Raya Jakarta-Bogor No.3, Sukamaju, Cilodong-Kota Depok pada Jumat (25/12/2020) lalu.

Kegiatan yang menyerap aspirasi warga ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Reses Anggota DPR RI Tahun Pesidangan 2019-2020.

Selain berdialog dan menyerap aspirasi, pada kesempatan ini, Nur Azizah juga menyerahkan santunan dhuafa bagi lima orang warga Konghuchu yang membutuhkan.

Dalam kegiatan sapa warga ini, Nur Azizah berterimakasih atas dukungan warga Konghucu dalam Pileg 2019 hingga dapat mengantarkan dirinya mendapat kursi DPR RI dari Fraksi PKS.

"Terimakasih atas pengorbanan bapak ibu telah mengerahkan massa untuk memilih saya, di pileg 2019.

Saat ini saya di amanahi di Komisi VIII, salah satunya bermitra dengan Kemenag RI. Semoga melalui kegiatan ini, bisa menyerap aspirasi khususnya dari masyarakat Konghucu Depok untuk disampaikan kepada Kemenag", jelas Nur Azizah.

Kegiatan yang dihadiri oleh 40 orang warga Konghucu beserta Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Semangat Genta Rohani (Segar) Cilodong, Oey Ok Tian, Ketua Makin Kota Depok Bidang Pelayanan Ummat, Wicandra, serta Tatang Haerudin sbg Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Kota Depok dan Eka Wijaya selaku anggota Dewan

Rohaniwan MATAKIN Pusat.

Kehadiran Nur Azizah disambut sangat antusias oleh warga Konghucu Depok, salah satunya Inggi. Inggi mengaku selama ini sangat mengagumi sosok Nur Azizah dan ia bahagia atas adanya kunjungan ini.

"Saya bersyukur dan berterimakasih, seperti anak yg dikunjungi orangtuanya. Kami merasa sangat terhormat. Kehadiran ibu telah menjawab kerinduan kami akan sosok orangtua, yang selama ini kami kurang merasakannya. Saya kagum sama Ibu, ketika bertemu lagi saya sangat terharu. Sebagai perempuan, saya banyak mengambil teladan dari ibu saat berkiprah di masyarakat yg tidak membedakan Suku, Agama dan Ras. Ibu tidak segan mau mengunjungi kami, dan mau berbagi pengalaman kepada kami. Saya sangat kagum sama Ibu, Ibu adalah idola saya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan", ungkap Inggi.

Selain itu, Ketua Makin Segar Oey Ok Tian, berterimakasih atas perhatian Nur Azizah, khususnya kepada Warga Konghucu di Depok.

Ia turut menyampaikan harapannya kepada Nur Azizah agar kedepannya dapat terus memperhatikan kepentingan masyarakat Konghucu yang minoritas.

"Kami berterimakasih atas kehadiran Ibu Nur. Kami menginginkan adanya kesejahteraan,



Saat ini saya di amanahi di Komisi VIII, salah satunya bermitra dengan Kemenag RI. Semoga melalui kegiatan ini, bisa menyerap aspirasi khususnya dari masyarakat Konghucu Depok untuk disampaikan kepada Kemenag"

dimana setiap kami ada aktivitas, tidak ada lagi diskriminasi", terang Oey Ok Tian.

Menanggapi hal itu, Nur Azizah sependapat dan mendukung. Karena kesejahteraan merupakan hak

segala bangsa tidak mengenal suku, agama, maupun ras.

"Saya sependapat, memang kesejahteraan itu hak kita semua, semua masukan dari bapak ibu, silahkan dituliskan dalam lembar

Tumbuhkan Budaya Literasi

Sakinah Aljufri Serahkan Bantuan Buku ke Komunitas Pegiat Literasi

KUTIPAN

Jakarta (13/01) — Membaca merupakan salah satu cara untuk memperkaya ilmu pengetahuan

Namun, dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi dan informasi justru dirasa mempengaruhi turunnya minat baca masyarakat.

Walaupun perkembangan teknologi tidak sepenuhnya menjadi penyebab rendahnya minat baca. Diantara penyebab turunnya budaya literasi adalah minimnya akses bahan bacaan dan kurangnya minat baca.

Untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi, Sakinah Aljufri membagikan 1.000 eksemplar buku dengan berbagai macam judul untuk dua komunitas pegiat literasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Selasa, (12/01/2021).

Dua komunitas pegiat literasi yang mendapatkan bantuan adalah Komunitas

Literasi KAMMI di Kota Palu dan Komunitas Literasi Pinbuk Kabupaten Sigi.

Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, menyinggung pentingnya membaca untuk membuka cakrawala keilmuan.

“Membaca adalah jendela dunia, melalui membaca akan membuka cakrawala pemikiran kita secara luas dengan berbagai macam ilmu,” ungkap Sakinah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pegiat literasi dengan keterbatasan fasilitas yang ada, namun tetap giant melakukan kegiatan guna menumbuhkan minat baca masyarakat.

Tingkat literasi Indonesia masih rendah, Sakinah pun mendorong komunitas pegiat literasi untuk semakin inovatif dalam mengajak masyarakat agar gemar membaca.

“Anak-anak juga perlu sentuhan, adakan lomba menyimpulkan cerita antar

anak-anak dari buku yang mereka baca yang diadakan pada hari-hari besar nasional seperti pada peringatan hari kartini, hari pahlawan nasional, hari tujuh belas agustus, agar menumbuhkan budaya literasi pada anak-anak,” terang Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Dalam kesempatan ini, Rina Wulandari, ketua Komunitas Literasi KAMMI memberikan ucapan terima kasih kepada Sakinah Aljufri atas bantuan buku yang dibelikan kepada komunitasnya.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak atas pemberian fasilitas berupa buku bacaan yang diberikan oleh ibu Sakinah Aljufri. Tentunya buku ini akan kami gunakan sebaik-baiknya dan terus menerab kebermanfaatan literasi bagi masyarakat sekitar. Sebelum pandemi covid-19 kami rutin membuka lapak baca di tempat-tempat keramaian di Kota Palu,” ungkap Rina.

Dengan bantuan buku-buku, Rina menambahkan,



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

“Anak-anak juga perlu sentuhan, adakan lomba menyimpulkan cerita antar anak-anak dari buku yang mereka baca yang diadakan pada hari-hari besar nasional seperti pada peringatan hari kartini, hari pahlawan nasional, hari tujuh belas agustus, agar menumbuhkan budaya literasi pada anak-anak.”

pihaknya menjadi lebih semangat untuk terus menjalankan tugas-tugas kami dan meneruskan ikhtiar kami membangun literasi Indonesia menjadi lebih baik.

“Jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulisliah,” pungkas Rina.



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA ✓
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Saudaraku, coba perhatikan betapa banyak nikmat Allah (lihat pada dirimu sendiri), maka tak ada alasan untuk malas ibadah kepada Allah.

10.42 PM · 12 Jan 2021 · Twitter for iPhone

Soal Pemblokiran Rekening FPI serta Keluarga MRS dan Afiliasinya

HNW: Harus Berbasis Hukum dan Keadilan

KUTIPAN

Jakarta (13/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta agar pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI) dan keluarga MRS sejumlah pihak terafiliasi dengan FPI tidak dilakukan secara serampangan

dan tetap mengedepankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan keadilan.

"Konstitusi menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan juga menjamin hak asasi terkait hak mempertahankan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 28A dan Pasal 28C," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (12/01/2021).

HNW sapaan akrabnya menuntut bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah semestinya bahwa setiap tindakan Pemerintah, termasuk memblokir suatu organisasi atau seseorang, tidak dilakukan sekenanya tanpa mekanisme yang sudah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

"Kita juga sudah memiliki beberapa instrumen hukum terkait pemblokiran rekening yang harus dipegang bersama-sama," ujarnya.

Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Dua aturan ini yang dijadikan dasar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pemblokiran rekening," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan apakah mekanisme pemblokiran sudah melewati proses yang dibenarkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sebagaimana disebutkan oleh UU No. 9 Tahun 2013.

"Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar pemblokiran tidak dilakukan secara sewenang-wenang," pungkasnya.

HNW mengutip ketentuan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi 'Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.'

Selain itu, lanjut HNW, tidak semua dana yang ada di rekening dapat diblokir. Ketentuan Pasal 34 memuat sejumlah pengecualian dana yang tidak boleh diblokir, yakni dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau korporasi yang meliputi, antara lain, pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari, biaya



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Langkah FPI yang mengikuti aturan hukum dan taat terhadap konstitusi, terutama prinsip negara hukum yang hormati HAM, hendaknya dibalas oleh PPATK dan Pengadilan juga dengan sepenuhnya mengikuti aturan hukum dan keadilan dalam penetapan terkait dengan pemblokiran

pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya, biaya penyediaan jasa hukum dan lain sebagainya.

"Apalagi diantara yang rekeningnya diblokir adalah anak-anak MRS, juga Munarnan selaku Sekretaris Umum FPI, padahal yang

bersangkutan sudah menyebutkan bahwa dana di rekening itu untuk pengobatan ibunya dan tidak terkait dengan FPI. Itu seharusnya termasuk yang dikecualikan dari pemblokiran," tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)



Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***